



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 44

NOMOR 2, DESEMBER 2018

DAFTAR ISI

<i>TARA MITI TOMI NUKU: MERAWAT TOLERANSI DALAM TRADISI DI ALOR, NUSA TENGGARA TIMUR</i> Katubi	1-16
ETHICAL CULTURE STRENGTHENING MODEL AT RESORT POLICE AS PART OF POLICE REFORM: A BOURDIEU'S HABITUS BASED APPROACH Ahrie Sonta	17-35
WARISAN KOLONIAL DAN MARGINALISASI ORANG LOLODA DI PANTAI BARAT HALMAHERA Abd. Rahman	36-47
SENI UNTUK DAMAI: UPAYA REKONSILIASI AKAR RUMPUT PASCA TRAGEDI 1965 Ganesh Cintika Putri	48-59
LAPISAN MARGINALISASI DAN KONSTRUKSI ILEGALITAS DALAM MASYARAKAT PERBATASAN DI PERBATASAN INDONESIA FILIPINA Dhimas Langgeng Gumelar, Natasha Devanand Dhanwani	60-75
BERDAMPINGAN DENGAN LELUHUR DI MASA DEPAN: HISTORISITAS, LANSKAP, DAN ARTIKULASI IDENTITAS MASYARAKAT TENGGER SENDURO Nabilla Nailur Rohmah	76-87
RITUAL <i>BEDEKEH</i> SUKU AKIT DI PULAU RUPAT KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU PADA ERA GLOBAL Suroyo	88-97
TINJAUAN BUKU EKOLOGI MANUSIA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Puji Hastuti	98-102
TINJAUAN BUKU MELIHAT PERKEMBANGAN SAINS DI INDONESIA, REVIEW BUKU <i>STS DI INDONESIA KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASINYA: QUO VADIS?</i> Muhammad Luthf	103-118



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 44

NOMOR 2, DESEMBER 2019

DAFTAR ISI

<i>TARA MITI TOMI NUKU: MERAWAT TOLERANSI DALAM TRADISI DI ALOR, NUSA TENGGARA TIMUR</i> Katubi	1-16
ETHICAL CULTURE STRENGTHENING MODEL AT RESORT POLICE AS PART OF POLICE REFORM: A BOURDIEU'S HABITUS BASED APPROACH Ahrie Sonta	17-35
WARISAN KOLONIAL DAN MARGINALISASI ORANG LOLODA DI PANTAI BARAT HALMAHERA Abd. Rahman	36-47
SENI UNTUK DAMAI: UPAYA REKONSILIASI AKAR RUMPUT PASCA TRAGEDI 1965 Ganesh Cintika Putri	48-59
LAPISAN MARGINALISASI DAN KONSTRUKSI ILEGALITAS DALAM MASYARAKAT PERBATASAN DI PERBATASAN INDONESIA FILIPINA Dhimas Langgeng Gumelar, Natasha Devanand Dhanwani	60-75
BERDAMPINGAN DENGAN LELUHUR DI MASA DEPAN: HISTORISITAS, LANSKAP, DAN ARTIKULASI IDENTITAS MASYARAKAT TENGGER SENDURO Nabilla Nailur Rohmah	76-87
RITUAL BEDEKEH SUKU AKIT DI PULAU RUPAT KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU PADA ERA GLOBAL Suroyo	88-97
TINJAUAN BUKU EKOLOGI MANUSIA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Puji Hastuti	98-102
TINJAUAN BUKU MELIHAT PERKEMBANGAN SAINS DI INDONESIA, REVIEW BUKU <i>STS DI INDONESIA KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASINYA: QUO VADIS?</i> Muhammad Luthfi	103-118



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 44

NOMOR 2, DESEMBER 2019

DDC:**Katubi**

TARA MITI TOMI NUKU: MERAWAT TOLERANSI DALAM TRADISI DI ALOR, NUSA TENGGARA TIMUR

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 1–16

ABSTRAK

Meningkatnya intoleransi beragama di Indonesia akhir-akhir ini menjadi masalah serius dalam konstruksi kehidupan multikultur. Akan tetapi, ada beberapa wilayah di Indonesia yang dianggap berhasil dalam menjaga toleransi, misalnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Alor-Pantar. Bahkan, ketika konflik dahsyat dengan isu agama melanda sebagian wilayah Indonesia bagian timur pasca-runtuhnya Orde Baru, solidaritas komunitas lokal orang Alor-Pantar mampu membuat mereka terhindar dari konflik dahsyat tersebut. Hal itu karena sejak dulu orang-orang di tiap kampung di Pulau Alor-Pantar mengembangkan cara untuk menghindari konflik, termasuk konflik yang bernuansa agama, berbasis tradisi. Oleh karena itu, kehidupan beragama masyarakat di Kepulauan Alor-Pantar dan hubungannya dengan adat banyak mengundang minat para akademisi untuk membahasnya. Berbeda dengan berbagai tulisan para akademisi sebelumnya, tulisan ini membahas tradisi komunitas Muslim dan Kristiani di Alor dalam menata kehidupan mereka melalui nilai kebudayaan dengan memberikan penghormatan khusus pada tradisi lokal, yakni semboyan Tara miti Tomi nuku, yang artinya 'berbeda-beda tetapi satu bersaudara.' Untuk membahas persoalan itu, tradisi lisan lego-lego menjadi titik tekan pembahasan. Tulisan ini berdasar penelitian lapangan dengan metode etnografi. Berdasar analisis pelaksanaan tradisi lisan lego-lego dan lirik lego-lego, tulisan ini memaparkan dua hal, yaitu 1) praktik sosial-budaya yang telah dilakukan antarkelompok beragama yang berbeda dalam menjaga toleransi, 2) cara berbagai kelompok etnis di Alor mengajarkan pentingnya saling menghargai antarumat beragama melalui tradisi lisan lego-lego, terutama melalui lirik lagunya.

Kata kunci: *toleransi beragama, tara miti tomi nuku, lego-lego, tradisi lisan, Alor, multikulturalisme*

DDC:**Ahrie Sonta**

ETHICAL CULTURE STRENGTHENING MODEL AT RESORT POLICE AS PART OF POLICE REFORM: A BOURDIEU'S HABITUS BASED APPROACH

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 17–35

ABSTRACT

This research emerged from concerns over cultural reform within the Indonesian Police, which has yet to show expected results, compared to successfully materialized structural and instrumental changes within the frame of Police Reform in the past two decades. Ethical culture, in this research, is believed as 'organizational capital' that is needed by the Police to facilitate cultural change. Inquiry into police habitus at the Sidoarjo Resort Police as this research's object, revealed some problems hindering institutional integrity, i.e.: reminders of paramilitary culture, police doxa as crime-fighter, insufficient and partial development of internal oversight system, absence of public participatory ethical infrastructure, and deontologic or rule-based definition of ethical approach. In

the time being, on personel integrity aspect, there found the following problems: limited comprehension of ethics as a philosophy and of public ethics as public official's code of conduct, absence of training on ethics in police education, absence of supporting symbolic capitals, and weaknesses within recruitment and socialization system for newly recruited officers. A model of ethical culture strengthening is thus developed to overcome the problems on institutional and personel integrity, particularly at the resort level police organization.

Keywords: *Public Ethics, Ethical Culture, Sidoarjo City Resort Police, Structure-Agent*

DDC:

Abd. Rahman

WARISAN KOLONIAL DAN MARGINALISASI ORANG LOLODA DI PANTAI BARAT HALMAHERA

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 36–47

ABSTRAK

Paper ini bertujuan membahas secara singkat mengenai situasi keterpinggiran Loloda di Pesisir Pantai Barat Halmahera dalam segala sektor pembangunan dibandingkan daerah-daerah lainnya di Maluku Utara. Berbicara mengenai Maluku Utara, tidaklah lengkap apabila tidak membicarakan Loloda, sebagai bagian integral dari dunia Maluku. Informasi sezaman menyatakan bahwa Loloda merupakan bekas kerajaan tertua Maluku (Moloku Loloda) di pesisir pantai barat laut Halmahera, Kawasan Laut dan Kepulauan Maluku. Loloda merupakan bagian utama dari sejarah dan kebudayaan “dunia Maluku” sejak berdirinya pada abad ke-13 Masehi. Upaya mempertahankan dan melestarikan adat dan tradisi Kerajaan Loloda terus berlagsung hingga kini, meskipun sejak periode orde lama (1950-1969) seluruh daerah di Indonesia yang dahulunya berbasis kerajaan atau Kesultanan telah dihapuskan. Daerah-daerah itu diintegrasikan ke dalam nomenklatur sistem administrasi pemerintahan daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengintegrasian itu merupakan restrukturisasi Pemerintahan Republik Indonesia ke dalam bentuknya yang baru dan resmi, selama lebih dari dua dekade masa kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah masih ada kekuatan hegemonik Ternate sebagai Warisan Kolonial Hindia Belanda atas Loloda, sehingga daerah bekas kerajaan Maluku tertua ini masih terpinggirkan dari pembangunan daerah dan nasional? Penulisan ini menggunakan metode dan metodologi sejarah, melalui studi-studi kepustakaan, kearsipan, dan pengamatan di lapangan, serta wawancara lisan dengan informan-informan terpilih.

Kata Kunci: *Loloda, Halmahera, Warisan, Kolonial, Marginalisasi.*

DDC:

Ganesh Cintika Putri

SENI UNTUK DAMAI: UPAYA REKONSILIASI AKAR RUMPUT PASCA TRAGEDI 1965

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 48–59

ABSTRAK

Pembunuhan massal dan penghilangan paksa yang terjadi pasca tragedi 1965 menyisakan konflik berkepanjangan hingga kini. Narasi sejarah yang dibentuk pemerintah menempatkan sekelompok orang yang diduga berkaitan dengan PKI mengalami stigmatisasi dan ketidakadilan hingga 40 tahun setelahnya. Tulisan ini bermaksud menganalisis strategi yang dilakukan masyarakat akar rumput untuk menciptakan narasi alternatif sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi. Secara khusus, tulisan ini akan menganalisis narasi sejarah alternatif yang disuguhkan lewat pementasan teater Gejolak Makam Keramat pada 13 Juli 2017 di Yogyakarta. Pementasan ini dipilih karena proses pembuatan naskah, latihan, pemilihan metode bertutur, serta pelibatan penonton yang mampu menarasikan sejarah alternatif di tengah narasi dominan yang menghambat upaya rekonsiliasi. Tulisan ini ingin mengatakan bahwa Teater Gejolak Makam Keramat memberikan ruang bagi narasi sejarah alternatif sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi akar rumput. Paling tidak terdapat tiga strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu: pengemasan narasi alternatif dalam objek seni yang lebih aman dari persekusi; partisipasi penyintas sebagai subjek dari narasi, serta; pelibatan audience dalam proses penyajian narasi.

Kata kunci: *seni, teater, rekonsiliasi, narasi alternatif*

DDC:

Dhimas Langgeng Gumelar, Natasha Devanand Dhanwani
LAPISAN MARGINALISASI DAN KONSTRUKSI ILEGALITAS DALAM
MASYARAKAT PERBATASAN DI PERBATASAN INDONESIA FILIPINA

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 60–75

ABSTRAK

Studi marginal mendekati fokus kajian sering pada identitas suatu komunitas tempatan, tanpa di sadari, pandangan tersebut mengkonstruksi dimensi marginal yang anakronistik. Studi tersebut menjerumuskan masyarakat di perbatasan Indonesia-Filipina, dan memunculkan romantisme. Studi yang dilakukan di Kepulauan Sangihe, berdasar pada fakta-fakta etnografis dan historis, serta observasi yang dilakukan selama bulan Juli-Agustus 2018. Kami menggunkan hubungan relasional untuk menangkap plot transformasi pada catatan Eropa serta kajian historis yang sudah diterbitkan. Hubungan tersebut pada dasarnya mendeskripsikan kelompok pejuang yaitu buruh paksa yang dijadikan budak. Transformasi tidak meninggalkan dimensi tradisional, khususnya adalah bagaimana penguasaan selama ini dilakukan oleh sistem ekonomi Feodalisme hingga Kapitalisme. Di wilayah perbatasan, Orang Sangir yang tinggal dekat dengan laut melakukan mobilisasi sebelum orang-orang Eropa datang, dan dimensi tradisional tersebut masih dilakukan, tetapi dibawah kuasa baru, yaitu negara modern. Mendasarkan diri pada isu transnasionalisme dan sekuritas, Indonesia dan Filipina membuat regulasi yang mengatur mobilitas migran. Pada akhirnya, Orang Sangir tersebut merasa selalu menjadi kriminal, disematkan stigma ilegal, tereksklusi dari kepulauannya sendiri di mana masyarakat yang tidak tinggal di Sangihe Besar mengklaim dirinya sebagai *Orang Pulo*. Kami melihat bahwa wilayah perbatasan Indonesia-Filipina sebagai wilayah abu-abu, cair, dan laboratorium kreatif.

Keywords: Marginal, Hubungan Relasional, Legal-Ilegal, Orang Sangir

DDC:

Nabilla Nailur Rohmah
BERDAMPINGAN DENGAN LELUHUR DI MASA DEPAN: HISTORISITAS,
LANSKAP, DAN ARTIKULASI IDENTITAS MASYARAKAT TENGGER SENDURO

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 76–87

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji signifikansi historis ajaran leluhur dan lanskap Puncak Songolikur bagi masyarakat Tengger di Senduro dan bagaimana historisitas tersebut dimaknai, direpresentasikan, dan direkonstruksi dalam konteks sejarah masa kini. Dalam tulisan ini, cerita rakyat Tengger tentang “Joko Seger dan Roro Anteng” tidak dikaji sebagai legenda ataupun mitos, melainkan sebagai sejarah publik yang memiliki relevansi dengan realita sosial masa kini. Bagi orang Tengger, cerita mengenai asal-usul leluhurnya menyangkut keseluruhan kerangka teologis yang mendasari tatanan sosial dan praktik kultural dalam kehidupan kesehariannya. Kebijakan Lima Agama Mayoritas rezim Orde Baru telah menyebabkan Hinduisasi dan Islamisasi besar-besaran, yang juga berpengaruh besar terhadap tatanan sosial dan kultural masyarakat Tengger. Terlebih lagi, penerapan kebijakan Taman Nasional dan Pariwisata di ruang hidup mereka telah melahirkan tantangan yang lebih besar, yang memanifestasikan tatanan kehidupan yang semakin kapitalistik dan profan. Dalam kondisi ini, Puncak Songolikur menghadirkan dan merawat narasi historis mengenai leluhur masyarakat Tengger di Senduro, sebagaimana pula merawat nilai-nilai spiritual, tatanan sosial, praktik budaya, dan keseluruhan cara hidup yang menyertainya. Namun, pengembangan destinasi wisata “Puncak B29” di lanskap Puncak Songolikur sejak 2013 menjadi tantangan sekaligus peluang bagi narasi sejarah masyarakat Tengger Senduro. Dalam tulisan ini akan ditunjukkan bagaimana pengembangan pariwisata dapat berpeluang menjaga sekaligus mengkontestasikan historisitas Puncak Songolikur. Pembahasan tersebut menyangkut bagaimana masyarakat Tengger di Senduro menegaskan, menegosiasikan, dan mengartikulasikan kembali identitasnya dalam konteks sejarah hari ini.

Kata kunci: Tengger Senduro, Puncak B29, Puncak Songolikur, Historisitas, Artikulasi

DDC:
Suroyo

RINGKASAN DISERTASI:
RITUAL *BEDEKEH* SUKU AKIT DI PULAU RUPAT
KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU PADA ERA GLOBAL

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 88–97

ABSTRAK

Ritual *bedekeh* sangat erat kaitannya dengan tradisi dan adat istiadat masyarakat suku Akit. Suku Akit menggunakan sistem pengetahuan, kepercayaan persepsi sebagai bagian dari kebudayaan dan tradisi mereka terhadap konsep sehat dan sakit serta penyebab sakit tersebut. Suku Akit dan masyarakat pendukungnya telah memiliki pengetahuan lokal (*local knowlegde*) dan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam mengatasi masalah kesehatan dan cara mengobatinya apabila masyarakat mengalami gangguan kesehatan. Penelitian ini membahas tradisi ritual *bedekeh* suku Akit di Pulau Rumat Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Tradisi ini masih tetap dipraktikkan oleh masyarakat suku Akit, tetapi keberadaan sekarang semakin terpinggirkan oleh faktor intern dan ekstern. Pelaksanaan ritual *bedikie* banyak mengandung kearifan lokal, simbol, nilai, dan dampak bagi kehidupan masyarakat pendukungnya. Penelitian ritual *bedekeh* oleh *bomoh* pada suku Akit di Pulau Rumat Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dirancang sesuai dengan paradigma keilmuan kajian budaya (*cultural studies*). Sebagai landasan analisis, digunakan teori hegemoni, teori praktik, dan teori wacana relasi kuasa dan pengetahuan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, studi pustaka, dan dokumentasi.

Berdasarkan telaah dan metode analisis pelaksanaan upacara ritual mempunyai tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut Pertama, pemeriksaan, yaitu pemeriksaan perlengkapan upacara ritual dipimpin oleh *Batin* dan *Bomoh* menentukan waktu untuk mengadakan ritual. Kedua, penyerahan, yaitu *Bomoh* menyerahkan peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam upacara pelaksanaan ritual, Ketiga, *tegak bomoh*, yaitu berlangsungnya upacara ritual pengobatan oleh *bomoh*. Faktor yang memengaruhi semakin terpinggirnya ritual *bedekeh* suku Akit di Desa Hutan Panjang, Kecamatan Rumat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau adalah relasi kuasa dalam konversi agama, stigma negatif bahwa orang Akit terkenal dengan ilmu sihir, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem pengobatan modern dan pengaruh pendidikan formal dan nonformal dalam berbagai jenjang dan cara berpikir manusia. Implikasi dari keterpinggiran ritual *bedekeh* adalah sikap terbuka suku Akit melalui kontak budaya (akulturasi) dengan kebudayaan lain, penyederhanaan praktik ritual oleh *bomoh* dalam dimensi waktu, dan semakin menguatnya identitas suku Akit. Upaya yang dilakukan sebagai langkah strategis pewarisan ritual *bedekeh* secara intern dan ekstern. Profesi *bomoh* dianggap sangat membantu dan masih dibutuhkan untuk pengobatan, pemerintah diharapkan memberikan bantuan kepada profesi *bomoh* dari segi pendanaan (tunjangan) agar lebih fokus terhadap profesi sebagai pengobat tradisional.

Kata kunci: bedikie, bomoh, suku Akit, keterpinggiran, pewarisan

DDC:
Puji Hastuti
TINJAUAN BUKU:
EKOLOGI MANUSIA DAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN

Prof. Oekan S. Abdoellah, Ph.D., PT Gramedia Pustaka Utama, 2017. 256 hlm.

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 98–102

DDC:

Muhammad Luthfi

TINJAUAN BUKU:

MELIHAT PERKEMBANGAN SAINS DI INDONESIA,

REVIEW BUKU *STS DI INDONESIA KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASINYA:*

QUO VADIS?

Soewarsono, Thung Ju Lan, & Dundin Zaenuddin. *STS di Indonesia Kebijakan dan Implementasinya: Quo Vadis?* PT Gading Inti Prima (Anggota IKAPI): 186 hlm, 16 x 21 cm.

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 103–118



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 44

NOMOR 2, DESEMBER 2019

DDC:**Katubi****TARA MITI TOMI NUKU: NURTURING TOLERANCE OF TRADITION IN ALOR, EAST NUSA TENGGARA**

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 1–16

ABSTRACT

The increase of religious intolerance in Indonesia has recently become a serious problem in the construction of multicultural life. However, some areas in Indonesia are considered successful in maintaining tolerance, for instance, in the Province of East Nusa Tenggara, particularly in Alor-Pantar Island. When a great conflict in the context of religious issues occurred in parts of Eastern Indonesia after the collapse of the New Order, the Alor-Pantar local community could avoid this terrible conflict due to their solidarity. It is because people from each village in Alor-Pantar Island have developed means to avoid conflicts based on tradition, including conflicts in religious terms. Therefore, academics are encouraged to discuss about the religious life of the people in the Alor-Pantar Island and its relationship with customs. Different from prior writings, this article discusses the traditions of the Muslim and Christian communities in Alor in undergoing their lives through cultural values by giving special respect to a local tradition, *Tara miti Tomi nuku*, which means 'brotherhood in diversity'. To disclose this issue, the oral tradition of *lego-lego* will be the center of discussion. This paper is based on field research using ethnographic methods. Based on the analysis of the implementation of the *lego-lego's* oral tradition and the *lego-lego's* lyrics, this paper describes two things, which are 1) socio-cultural practices that have been carried out by different religious groups in maintaining tolerance; 2) means that various ethnic groups in Alor have been undertaken to teach the importance of interfaith mutual respect through the oral tradition of *lego-lego*, especially through the lyrics of the song.

Keywords: *religious tolerance, tara miti tomi nuku, lego-lego, oral tradition, Alor, multiculturalism***DDC:****Ahrie Sonta****ETHICAL CULTURE'S STRENGTHENING MODEL AT RESORT POLICE AS PART OF POLICE REFORM: A BOURDIEU'S HABITUS BASED APPROACH**

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 17–35

ABSTRACT

This research emerged from concerns over cultural reform within the Indonesian Police, which has yet to show expected results, compared to successfully materialized structural and instrumental changes within the frame of Police Reform in the past two decades. Ethical culture, in this research, is believed as 'organizational capital' that is needed by the Police to facilitate cultural change. Inquiry into police *habitus* at the Sidoarjo Resort Police as this research's object, revealed some problems hindering institutional integrity, i.e.: reminders of paramilitary culture, police *doxa* as crime-fighter, insufficient and partial development of internal oversight system, absence

of public participatory ethical infrastructure, and deontologic or rule-based definition of ethical approach. In the time being, on personel integrity aspect, there found the following problems: limited comprehension of ethics as a philosophy and of public ethics as public official's code of conduct, absence of training on ethics in police education, absence of supporting symbolic capitals, and weaknesses within recruitment and socialization system for newly recruited officers. A model of ethical culture strengthening is thus developed to overcome the problems on institutional and personel integrity, particularly at the resort level police organization.

Keywords: Public Ethics, Ethical Culture, Sidoarjo City Resort Police, Structure-Agent

DDC:

Abd. Rahman

COLONIAL HERITAGE AND MARGINALIZATION OF THE LOLODA PEOPLE ON THE WEST COAST OF HALMAHERA

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 36–47

ABSTRACT

This paper aims to briefly discuss the marginalized situation of the Loloda people on the west coast of Halmahera in all development sectors compared to other regions in North Maluku. Discussing North Maluku, it is not complete without talking about Loloda as an integral part of the Moluccas' world. Contemporary information states that Loloda is the oldest kingdom of Moluccas (Moloku Loloda) on the northwest coast of Halmahera, the Molucca Sea Region and Islands. Loloda is the main part of the history and culture of the "Moluccan world" since its foundation in the 13th Century. Attempts to maintain and preserve customs and traditions of the Kingdom of Loloda are still ongoing until today, although since the Old Order period (1950-1969), all regions in Indonesia dominated by the Kingdom and Sultanate systems were abolished. Those regions are integrated into the nomenclature of the regional administration system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This integration is the realization of restructuring the Republic of Indonesia to the new and official form for more than two decades of independence. The question is whether or not the hegemonic power of Ternate as the Dutch East Indies' colonial heritage of Loloda remains in existence, so the former area of the oldest kingdom of Moluccas is still marginalized from regional and national development. This article utilizes historical methods and methodologies throughout a study of literature, archives, and field observations, as well as interviews with selected resource persons.

Keywords: Loloda, Halmahera, Heritage, Colonial, Marginalization

DDC:

Ganesh Cintika Putri

ART FOR PEACE: GRASSROOTS' RECONCILIATION EFFORTS AFTER THE 1965 TRAGEDY

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 48–59

ABSTRACT

Mass killings and enforced disappearances which occurred after the 1965 tragedy have been becoming a prolonged conflict until today. The historical narrative shaped by the government puts a group of people who were allegedly involved in the Communist Party of Indonesia (PKI) experiencing stigmatization and injustice for up to 40 years. This paper intends to analyze the strategies undertaken by grassroots communities to create alternative narratives as a part of the reconciliation efforts. Particularly, this paper will examine the alternative historical narratives presented in the Gejolak Makam Keramat Theatrical Performance on July 13, 2017, in Yogyakarta. This performance was chosen due to the arts of scripts making, practices, choices of speaking methods, and the involvement of audiences which were able to narrate alternative history amidst the dominance of narratives that hindered the reconciliation attempts. This paper would like to say that the Gejolak Makam Keramat Theatrical Performance has contributed a space to historical narratives as a part of grassroots reconciliation efforts. There are, at least, three strategies implemented to achieve those objectives, which are: the packaging of alternative narratives in an art object which is safer than persecution; the participation of survivors as the subject of the narrative, and; the involvement of audiences in the process of presenting the narration.

Keywords: art, theater, reconciliation, alternative narratives

DDC:

Dhimas Langgeng Gumelar, Natasha Devanand Dhanwani

MARGINALIZATION LEVELS AND ILLEGAL CONSTRUCTION IN BORDER COMMUNITIES ON THE INDONESIA-THE PHILIPPINES BORDER

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 60–75

ABSTRACT

Marginal studies often focus on the identity of a local community which unconsciously construct an anachronistic marginal dimension. That study also plunged the people of the Indonesia-the Philippines border and showed up romanticism. The research was conducted on Sangihe Islands, based on ethnographic and historical facts and observations undertaken in July-August, 2018. We use relational relations to capture the plot of transformation in European records and historical studies that have been published. The relationship describes a group of fighters which consisted of forced laborers who became slaves. Transformation cannot be disengaged from the traditional dimension, particularly on how control has been ruled out by the dominance of the economic system of Feudalism to Capitalism. In the border area, the Sangir people, who resided nearby the sea, mobilized before the Europeans arrived. The traditional dimension was still carried out, but under the new authority, which is the modern state. Based on the issues of transnationalism and security, Indonesia and the Philippines made a regulation that regulated the mobility of migrants. The Sangir people, eventually, found themselves as criminals, which were identic with illegal stigma, and were excluded from their own islands where people who did not live in Sangihe Besar claimed themselves as *Orang Pulo*. We perceive the Indonesia-the Philippines border as a gray, liquid, and creative laboratory area.

Keywords: *Marginal, Relational Relations, Legal-Illegal, Sangir People*

DDC:

Nabilla Nailur Rohmah

SIDE BY SIDE WITH ANCESTORS IN THE FUTURE: HISTORICAL, LANDSCAPE, AND ARTICULATION OF THE IDENTITY OF THE TENGGER SENDURO PEOPLE

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 76–87

ABSTRACT

This article studies the historical significance of the ancestral tenet and the landscape of Puncak Songolikur for Tengger people in Senduro and how they are being performed, represented, and reconstructed in the present historical context. In this paper, the Folklore of Tengger about “Joko Seger and Roro Anteng” is studied neither as legend nor myth, but as public history which has relevance to the present social realities. For them, the story of the origin of their ancestor encompasses the overall theological framework that underlies the social order and cultural practices in their everyday life. The five religions policy during the authoritarian New Order regime has led to a massive Hinduization and Islamization which has a great influence on the social and cultural order of Tengger people. Moreover, the enforcement of national park and tourism policy in their living space has raised greater challenge which manifests an increasingly capitalistic and profane life order. Under this condition, Puncak Songolikur presents and preserves the historical narrative about their ancestors as well as spiritual values, social order, cultural practice, and life. However, the development of tourist destination “Puncak B29” in the landscape of Puncak Songolikur since 2013 has become both a challenge and opportunity for their historical narratives. This paper explores how tourism development maintains and simultaneously contests the historicity of Puncak Songolikur. It includes how people assert, negotiate, and rearticulate their identity in current cosmopolite historical horizon.

Keywords: *Tengger Senduro, Puncak B29, Puncak Songolikur, Historicity, Articulation*

DDC:

Suroyo

DISSERTATION SUMMARY: THE *BEDEKEH* RITUAL OF THE AKIT PEOPLE IN RUPAT ISLAND, BENGKALIS REGENCY, RIAU PROVINCE, IN THE GLOBAL ERA

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 88–97

ABSTRACT

The *bedekéh* ritual is closely linked to the customs and traditions of the Akit people. The Akit people use the system of knowledge in which the belief in perception as a part of their culture and tradition towards health and sick concepts as well as the causes of diseases. The Akit people and their relatives utilize local knowledge and local wisdom in overcoming health problems as well as a means to cure the diseases. This research discusses the ritual tradition of *bedekéh* traditionally held by the Akit people in Rupert Island, Bengkalis Regency, Riau Province. The Akit people remain practicing this tradition, but its existence is now slowly marginalized by internal and external factors. *Bedekéh rituals* encompass a lot of local wisdom, symbols, values, and impacts for the lives of the Akit People. Research on *bedekéh rituals* by the *bomoh* of the Akit people in Rupert Island, Bengkalis Regency, Riau Province was designed based on the scientific paradigm of cultural studies. As an analysis framework, hegemony, practical, and power and knowledge relations theories are used to sharpen the research result. The data collection was undertaken through observations, in-depth interviews, a study of literature, and documentation.

Based on research and analysis methods, the implementation of rituals has several steps to be done. First, an investigation in which the inspection of ritual equipment is done and led by *Batin*, and *Bomoh* determines the time to hold the rituals. Secondly, a handover in which *Bomoh* gives the necessary equipment and materials for the implementation of rituals. Thirdly, *tegak bomoh* in which *bomoh* conducts the rituals for treating sick people. Some factors affecting the marginalized condition of *bedekéh* rituals of the Akit people in Hutan Panjang Village, Rupert District, Bengkalis Regency, Riau Province are power relations in religious conversion. It is seen that there is a negative perspective towards the Akit People who are famous for witchcraft, the development of science and technology in the modern medical system, and the influence of formal and non-formal education on various levels and the changing of ways of thinking in human beings. The impacts of the marginalized condition of *bedekéh* ritual are: the Akit people are more open in which cultural contacts (acculturation) occurred with other cultures, the ritual practices are simplified by *bomoh*, and the identity of the Akit people is getting stronger. These attempts are done as strategic steps to inherit *bedekéh* rituals internally and externally. *Bomoh* is considered very helpful and is still necessary for medication. The government is expected to provide assistance to *bomoh* in the context of funding (allowances) in order to be more focus on their job as a traditional healer.

Keywords: bedekéh, bomoh, Akit, marginalization, inheritance

DDC:

Puji Hastuti

TINJAUAN BUKU: EKOLOGI MANUSIA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Prof. Oekan S. Abdoellah, Ph.D., PT Gramedia Pustaka Utama, 2017. 256 hlm.

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 98–102

DDC:

Muhammad Luthfi

TINJAUAN BUKU: MELIHAT PERKEMBANGAN SAINS DI INDONESIA, REVIEW BUKU *STS DI INDONESIA KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASINYA: QUO VADIS?*

Soewarsono, Thung Ju Lan, & Dundin Zaenuddin. *STS di Indonesia Kebijakan dan Implementasinya: Quo Vadis?* PT Gading Inti Prima (Anggota IKAPI): 186 hlm, 16 x 21 cm.

Masyarakat Indonesia, Vol. 44 (2) Desember 2019: 103–118

TARA MITI TOMI NUKU: MERAWAT TOLERANSI DALAM TRADISI DI ALOR, NUSA TENGGARA TIMUR

Katubi

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI

Email: obingk@yahoo.com

ABSTRAK

Meningkatnya intoleransi beragama di Indonesia akhir-akhir ini menjadi masalah serius dalam konstruksi kehidupan multikultur. Akan tetapi, ada beberapa wilayah di Indonesia yang dianggap berhasil dalam menjaga toleransi, misalnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Alor-Pantar. Bahkan, ketika konflik dahsyat dengan isu agama melanda sebagian wilayah Indonesia bagian timur pasca-runtuhnya Orde Baru, solidaritas komunitas lokal orang Alor-Pantar mampu membuat mereka terhindar dari konflik dahsyat tersebut. Hal itu karena sejak dulu orang-orang di tiap kampung di Pulau Alor-Pantar mengembangkan cara untuk menghindari konflik, termasuk konflik yang bernuansa agama, berbasis tradisi. Oleh karena itu, kehidupan beragama masyarakat di Kepulauan Alor-Pantar dan hubungannya dengan adat banyak mengundang minat para akademisi untuk membahasnya. Berbeda dengan berbagai tulisan para akademisi sebelumnya, tulisan ini membahas tradisi komunitas Muslim dan Kristiani di Alor dalam menata kehidupan mereka bersama melalui nilai kebudayaan dengan memberikan penghormatan khusus pada tradisi lokal, yakni semboyan Tara miti Tomi nuku, yang artinya 'berbeda-beda tetapi satu bersaudara.' Untuk membahas persoalan itu, tradisi lisan lego-lego menjadi titik tekan pembahasan. Tulisan ini berdasar penelitian lapangan dengan metode etnografi. Berdasar analisis pelaksanaan tradisi lisan lego-lego dan lirik lego-lego, tulisan ini memaparkan dua hal, yaitu 1) praktik sosial-budaya yang telah dilakukan antarkelompok beragama yang berbeda dalam menjaga toleransi, 2) cara berbagai kelompok etnis di Alor mengajarkan pentingnya saling menghargai antarumat beragama melalui tradisi lisan lego-lego, terutama melalui lirik lagunya.

Kata kunci: *toleransi beragama, tara miti tomi nuku, lego-lego, tradisi lisan, Alor, multikulturalisme*

ABSTRACT

The increase of religious intolerance in Indonesia has recently become a serious problem in the construction of multicultural life. However, some areas in Indonesia are considered successful in maintaining tolerance, for instance, in the Province of East Nusa Tenggara, particularly in Alor-Pantar Island. When a great conflict in the context of religious issues occurred in parts of Eastern Indonesia after the collapse of the New Order, the Alor-Pantar local community could avoid this terrible conflict due to their solidarity. It is because people from each village in Alor-Pantar Island have developed means to avoid conflicts based on tradition, including conflicts in religious terms. Therefore, academics are encouraged to discuss about the religious life of the people in the Alor-Pantar Island and its relationship with customs. Different from prior writings, this article discusses the traditions of the Muslim and Christian communities in Alor in undergoing their lives through cultural values by giving special respect to a local tradition, Tara miti Tomi nuku, which means 'brotherhood in diversity'. To disclose this issue, the oral tradition of lego-lego will be the center of discussion. This paper is based on field research using ethnographic methods. Based on the analysis of the implementation of the lego-lego's oral tradition and the lego-lego's lyrics, this paper describes two things, which are 1) socio-cultural practices that have been carried out by different religious groups in maintaining tolerance; 2) means that various ethnic groups in Alor have been undertaken to teach the importance of interfaith mutual respect through the oral tradition of lego-lego, especially through the lyrics of the song.

Keywords: *religious tolerance, tara miti tomi nuku, lego-lego, oral tradition, Alor, multiculturalism*

PENDAHULUAN

1.1 Catatan Etnografis Lapangan

Pada tahun 2005, ketika saya melakukan penelitian di Alor, saya diajak oleh Bapak Camat Alor Barat Daya untuk mengikuti acara penutupan *Musabaqoh Tilawatil Qur'an* (MTQ) tingkat Kecamatan Alor Barat Daya di Desa Wolwal. Pada awalnya, tidak ada yang “aneh” menurut saya. Akan tetapi, pada saat acara akan ditutup dengan pembacaan doa, suara pembawa acara penutupan MTQ itu membuat mata saya terbelalak. Pembawa acara mempersilakan Bapak Pendeta, orang dari kelompok etnis Hamap, yang tinggal di Moru, untuk membacakan doa penutupan MTQ. Padahal, acara yang digelar adalah acara umat muslim. Saya bertanya kepada Bapak Camat: “apakah itu tidak salah sebut?” Jawab Pak Camat: “Tidak. Memang di sini hal seperti itu sudah biasa dan sejak zaman dulu juga sudah begitu. Di sini mungkin berbeda dengan di wilayah lain.” Setelah acara selesai, saya sempat berbincang dengan Bapak Pendeta itu. Dia menyatakan bahwa pada acara yang diadakan oleh umat Kristen, mereka biasa juga mengundang umat muslim dan mempersilakan Bapak Imam Islam membacakan doa.

Pada tahun 2011 saya diundang oleh Bapak Nassarudin Kinanggi, sebagai pemangku adat kerajaan Kui, untuk menghadiri acara peresmian pemugaran masjid tertua di Alor, tepatnya di kampung Lerabaing, Alor Barat Daya. Kampung Lerabaing itu adalah “kampung lama” orang Kui yang mayoritas beragama Islam. Setiba di kampung itu, Bapak Nasrudin Kinanggi memperkenalkan saya dengan ketua pelaksana acara peresmian masjid. Ternyata, ketua panitia dan anggota acara peresmian masjid itu adalah orang yang tinggal di dekat kampung Lerabaing, yang beragam Kristen. Orang-orang yang beragama Kristen inilah yang merancang kegiatan, bahkan menyediakan kayu bakar, membuat rumah-rumahan untuk menampung ribuan orang, dan juga bersiap-sedia tenaga selama sebelum, pada saat, dan sesudah pelaksanaan acara peresmian hasil pemugaran masjid itu. Saya “mengobrol” panjang lebar dengan orang-orang Abui (Kristen) yang menjadi panitia lokal itu berkaitan dengan kepanitiaan

dalam acara tersebut. Intinya, mereka menyatakan bahwa saling menolong tidak dibatasi oleh sekat agama. “Kami belajar dari nenek moyang kami di sini.” Itulah pungkas penjelasannya kepada saya.

Pada tahun 2017 saya berkesempatan hadir mengikuti acara pembukaan Pameran dan Pekan Budaya Kabupaten Alor, yang dihadiri dan dibuka oleh Bupati Alor. Penduduk Kabupaten Alor 68% memeluk agama Kristen, 29% memeluk agama Islam, dan 3 % memeluk agama Katolik. Memang ada pemeluk agama Hindu dan Budha, namun jumlahnya sangat sedikit (BPS Kabupaten Alor 2011). Dengan begitu, mayoritas orang Alor beragama Kristen. Orang yang hadir pada saat acara pembukaan Pameran dan Pekan Budaya Kabupaten Alor 2017 itu juga mayoritas beragama Kristen. Situasi itu membuat saya berpikir bahwa pasti pembacaan doa dilakukan dalam cara agama Kristen. Namun, dugaan saya salah. Doa dibacakan oleh seorang imam Islam dengan tata cara dalam agama Islam.

Meningkatnya tindakan Intoleransi di Indonesia dalam Catatan

Beberapa catatan lapangan yang sudah saya ceritakan sebelumnya membuat saya “berandai-andai,” seandainya semua daerah seperti di Alor, betapa harmonisnya hubungan antarumat beragama di Indonesia. Namun, pengandaian saya itu menjadi “buyar” tatkala saya menyaksikan Pilkada DKI, yang oleh sebagian pihak diklaim sebagai Pilkada terbrutal sepanjang sejarah pilkada di Indonesia karena isu SARA begitu mengemuka. Data *Democracy Index* dari *The Economist Intelligence Unit* yang diperkuat dengan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Pilkada DKI memiliki pengaruh yang menyebabkan turunnya Indeks Demokrasi DKI Jakarta pada 2016, yaitu dari 85,32 di 2015 menjadi 70,85 di 2016—atau turun sebesar 14,47 persen. Penurunan ini paling besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Padahal, pada 2015, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan Indeks Demokrasi paling tinggi di Indonesia dengan angka 85,32 persen.

Isu intoleransi kemudian menggelinding bak bola liar di Indonesia. Bahkan, berbagai hasil

kajian menunjukkan semakin meningkatnya tindakan intoleransi di Indonesia. Direktur The Wahid Foundation, Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman (Yenny) Wahid, pada Senin (29/1/2018) mengemukakan hasil survei nasional yang dilakukan pada 6--27 Oktober 2017, melibatkan 1.500 responden terdiri atas responden laki-laki (50 persen) dan perempuan (50 persen) di 34 provinsi dengan teknik *multistage random sampling*. Pada laporan berjudul "Potensi intoleransi terhadap kelompok yang tidak disukai," hasilnya menunjukkan mayoritas muslimin dan muslimah bersikap intoleran terhadap kelompok yang tidak disukai (57,1 persen). Jumlah itu meningkat dibanding survei pada 2016 dengan angka intoleran sebesar 51,0 persen. Sepuluh kelompok yang paling tak disukai muslim Indonesia, yakni meliputi komunis, LGBT, Yahudi, Kristen, Ateis, Syiah, China, Wahhabi, Katolik, dan Buddha. Survei dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) didukung oleh UN Women dan Wahid Foundation.

Hasil survei yang lebih mencengangkan adalah hasil survei SETARA Institute karena ibukota Republik Indonesia, DKI Jakarta, pada 2017 menjadi kota dengan skor toleransi terendah atau menjadi kota paling intoleran se-Indonesia. Peringkat kedua ditempati Banda Aceh dan peringkat ketiga adalah kota Bogor. SETARA Institute menyebut pada indeks 2017 ada beberapa kota baru yang dinilai tidak toleran, yaitu Cilegon, Yogyakarta, Banjarmasin, Makassar, dan Padang. Setara Institute mencatat pada 2017, terdapat 155 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 201 bentuk tindakan. Sebanyak 75 tindakan pelanggaran melibatkan aktor negara, yaitu 71 berbentuk tindakan aktif, 3 tindakan *by rule*, sementara 1 tindakan lain merupakan tindakan pembiaran. Sebanyak 126 tindakan dilakukan oleh aktor nonnegara dengan pelaku tertinggi adalah kelompok warga, yakni 28 tindakan.

Pada 2018, SETARA Institute mencatat pelanggaran atau kekerasan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KKB) di Indonesia naik dibandingkan tahun 2017. SETARA mencatat hingga Juni 2018 ada 109 intoleransi dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan. Lagi-lagi,

DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi paling tinggi atas terjadinya kekerasan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Disebutkan oleh SETARA Institute, ada lima provinsi menduduki peringkat teratas dengan jumlah kejadian pelanggaran, yaitu DKI Jakarta (23 kasus), Jawa Barat (19 kasus), Jawa Timur (15 kasus), Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta (9 kasus), dan Nusa Tenggara Barat (7 kasus).

SETARA Institute menyatakan bahwa secara umum kekerasan dalam KKB disebabkan oleh empat faktor. Pertama, peningkatan intensitas politisasi agama yang sejalan dengan tahun politik karena ada kepentingan politik elektoral. Kedua, meningkatnya kasus intoleransi pada level individu dan kelompok warga. Data SETARA Institute menyebutkan individu dan kelompok warga menduduki dua peringkat teratas pelaku pelanggaran KKB non-negara. Ketiga, kompleksitas persoalan pasal penodaan agama seiring dengan naiknya tren salah satu pelanggaran KKB setelah kelompok tertentu bisa memenjarakan Ahok. Keempat, masalah meleak digital dalam instrumentasi media sosial dan dunia maya oleh warganet. Media sosial justru digunakan sebagai wadah untuk mengungkapkan ujaran kebencian dan diskriminatif.

Pada Selasa (4/12/2018) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memaparkan hasil penelitiannya yang bertajuk "Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia." Penelitian yang dilakukan LIPI ini berbeda dengan kajian lain versi Wahid Institute, SETARA Institute, atau Lembaga Survei Indonesia (LSI) karena penelitian LIPI melakukan uji hipotesis, yakni sejauh mana identifikasi agama dan etnik berpengaruh terhadap intoleransi dan radikalisme dengan menggunakan beberapa variabel, seperti perasaan terancam, fanatisme keagamaan, ketidakpercayaan, penggunaan media sosial, tingkat sekularisasi, dan status sosial ekonomi. Penelitian LIPI menggunakan definisi intoleransi sebagai sebuah orientasi keagamaan yang menolak hak sosial dan hak politik dari kelompok agama atau kelompok etnik yang berbeda. Sementara itu, radikalisme adalah penafsiran keagamaan yang bertujuan untuk mengganti sistem politik suatu negara. Koordinator penelitian Dr. Cahyo

Pamungkas menjelaskan intoleransi berdasarkan isu agama telah muncul di sejumlah kota sejak 2015 sampai sekarang. Menurutnya intoleransi di media sosial berupa ujaran kebencian. Secara umum, hasil penelitian LIPI menunjukkan bahwa intoleransi politik di Indonesia cukup tinggi, sebaliknya intoleransi sosial rendah. Temuan lain yang mengkhawatirkan adalah lebih dari separuh responden setuju terhadap penggunaan kekerasan kepada kelompok yang mereka anggap sebagai “aliran sesat,” seperti Ahmadiyah dan Syiah. Hasil yang lebih mencengangkan adalah 40 persen responden setuju Indonesia menjadi negara Islam. Keinginan untuk menerima atau sikap untuk menerima pemimpin politik yang segama lebih besar dari sikap untuk menerima pemimpin yang satu etnik. Jadi, faktor identitas agama memiliki peranan yang sangat penting daripada etnik.

Burhanuddin Muhtadi bersama Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei nasional pada Agustus 2018 terhadap 1.520 responden yang dipilih dengan metode multistage random sampling. Berdasar jumlah sampel itu, diperkirakan *margin of error* sebesar lebih kurang 2,6% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Dalam studi ini, intoleransi dioperasionalkan dalam pertanyaan tentang apakah seorang muslim (atau non-muslim) merasa keberatan atau tidak, jika non-muslim (atau muslim) melakukan kegiatan peribadatan atau menjadi pemimpin pemerintahan pada berbagai tingkat. Dengan demikian, intoleransi dikategorikan ke dua dimensi, yakni intoleransi religius kultural dan intoleransi politik. Intoleransi religius kultural mencakup seberapa keberatan responden muslim (atau non-muslim) jika ada pemeluk agama lain membangun rumah ibadah atau melakukan kegiatan keagamaan. Sementara itu, intoleransi politik mengukur seberapa besar resistansi responden jika pemeluk agama lain menjadi presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, atau wali kota. Untuk memberikan gambaran utuh, akan disajikan data multitahun untuk mengetahui tren tingkat intoleransi berdasarkan data survei 2010-2018 (Burhanuddin Muhtadi dalam *Media Indonesia*, 20 Desember 2018).

Berdasarkan hasil surveinya, dia menyatakan bahwa warga muslim cenderung intoleran kepada non-muslim, terutama dalam hal politik. Pada 2018, sebanyak 59% responden muslim keberatan non-muslim menjadi presiden; 55% keberatan non-muslim menjadi wapres; 52% keberatan non-muslim menjadi gubernur, bupati, atau wali kota. Data kami menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir, terutama sejak aksi 212 pada 2016, intoleransi warga secara politik menunjukkan tren meningkat. Warga muslim keberatan jika non-muslim menjadi pemimpin pemerintahan pada berbagai tingkat. Sementara itu, tren intoleransi religius kultural sejak 2010 mengalami penurunan. Namun, tren penurunan ini berhenti pada 2018, bahkan sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sekitar separuh warga muslim saat ini, merasa keberatan jika non-muslim membangun tempat ibadah di sekitar mereka.

Sebanyak 30,7% muslim di Indonesia masuk kategori sangat intoleran, 17,1% intoleran, 20% toleran, dan 32,2% sangat toleran. Total muslim yang sangat intoleran atau intoleran sebanyak 47,8% pada saat survei 2018. Adapun rata-rata intoleransi pada 2018 sebanyak 54,2 dari skor 0 hingga 100. Skor intoleransi ini naik dua tahun berturut-turut: pada 2017 skor intoleransi sebanyak 50,4, sedangkan pada 2016 sebesar 48,6. Lantas, bagaimana intoleransi non-muslim di Indonesia? Secara umum, hasil survey yang dilakukannya menunjukkan bahwa non-muslim memiliki intoleransi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan muslim. Mereka lebih banyak yang merasa tidak keberatan dengan kegiatan keagamaan muslim dan peran muslim sebagai pemimpin pemerintahan. Dapat disimpulkan bahwa pada 2018 naiknya tren intoleransi di atas dibarengi dengan meningkatnya dosis politik identitas.

Pada akhir 2018, SETARA Institute membeberkan 10 kota yang paling toleran 2018 berdasarkan hasil penilaian Indeks Kota Toleran (IKT). Penilaian ini dilakukan di 94 kota di Indonesia dan juga 10 kota paling rendah toleransinya. Kota yang paling rendah toleransinya adalah kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Adapun sembilan kota lain yang dinilai minim toleransi adalah Banda Aceh, Jakarta,

Cilegon, Padang, Depok, Bogor, Makassar, Medan, dan Sabang.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah adanya data yang menunjukkan bahwa sebanyak 57% guru memiliki opini intoleran terhadap pemeluk agama lain. Sementara itu, 37,77% lainnya memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan intoleran atau intensi-aksi. Data itu berdasar hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah dengan tujuan untuk melihat pandangan serta sikap keberagaman guru sekolah dan madrasah di Indonesia. Asumsinya ialah guru mempunyai posisi strategis dan punya peran penting dalam pembentukan nilai-nilai, pandangan, serta pemikiran siswa. Penelitian ini menggunakan 2.237 guru sebagai sampel dengan proporsi 1.172 guru sekolah negeri dan 1065 guru sekolah swasta (dalam penelitian ini madrasah). Penelitian dilaksanakan selama satu bulan, 6 Agustus sampai 6 September 2018, dengan percontoh (*sample*) dari 34 provinsi di Indonesia, yang dipilih secara acak dengan menggunakan teknik *probability proporsional to size* (PPS).

Sejumlah kajian terdahulu tentang intoleransi, politisasi agama, dan radikalisme di Indonesia sudah banyak dalam berbagai tulisan. Beberapa di antaranya dapat dikemukakan sebagai berikut. Hayamatsu (2013) membahas tantangan demokrasi Indonesia karena meningkatnya intoleransi agama dan sikap diskriminatif dalam masyarakat sipil sejak pertengahan 2000-an, meskipun kebebasan diperluas di banyak bidang, termasuk media. Hayamatsu melalui artikel ini menyatakan dua faktor yang telah berkontribusi terhadap meningkatnya pengaruh kelompok garis keras/radikal dalam meningkatkan intoleransi beragama. Pertama, akses kelompok garis keras **tidak hanya** ke media baru, tetapi yang lebih penting, mereka juga menggunakan sarana dan institusi tradisional untuk mobilisasi agama dan politik, termasuk aparat negara, untuk menumbuhkan sentimen dan sikap antagonis terhadap apa yang mereka anggap musuh-musuh Islam di dalam komunitas muslim sambil menyebarkan interpretasi yang sempit dan dogmatis Islam. Kedua, munculnya politisi muslim konservatif di lembaga negara yang siap

dan ingin merangkul media baru dan teknologi komunikasi saat menggunakan kantor negara dan hak prerogatif untuk memajukan visi dan agenda keagamaan konservatif. Politisi konservatif itu dapat mengeksploitasi hak prerogatif mereka.

Namira (2015) menyoroti isu kebebasan beragama di Indonesia terkait dengan hak beragama Minoritas. Dia membeberkan data yang menunjukkan bahwa pemerintah masih tidak mampu menangani situasi ini dan untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka yang rentan terhadap penganiayaan dan diskriminasi. Sebagai negara yang terikat oleh hukum hak asasi manusia internasional, Indonesia jelas berkewajiban melindungi hak setiap orang di wilayahnya, termasuk agama minoritas. Keutamaan kebebasan beragama sudah dijamin dalam konstitusi negara, UUD 1945. Bahkan, Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan UU No. 29/1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang meliputi dukungan kebebasan beragama. Namun, definisi kebebasan beragama di Indonesia tertara tidak seperti hukum hak asasi manusia internasional karena telah dikurangi dalam sistem hukum Indonesia berdasar interpretasi yang lebih sempit. Agama minoritas, termasuk penganut kepercayaan, hampir tidak memiliki ruang di masyarakat. Pemerintah lebih suka menempatkan mayoritas sebagai prioritas di atas yang lain. Pengikut agama minoritas masih menghadapi perlakuan diskriminatif dalam menjalankan hak agama mereka. Sistem hukum yang ambigu dan keterlibatan institusi keagamaan turut andil dalam menciptakan lingkungan yang tidak toleran di Indonesia. Hukum dan keputusan tertentu juga bertentangan dengan hak untuk kebebasan beragama dan sejauh ini telah meminggirkan minoritas agama. Bahkan, intervensi oleh lembaga keagamaan, seperti MUI, melalui fatwanya, kadang telah memprovokasi kelompok agama radikal untuk melakukan penganiayaan dan serangan terhadap minoritas agama. Aksi main hakim sendiri oleh kelompok-kelompok agama radikal, dalam banyak kasus, tidak pernah dituntut secara adil oleh pengadilan sehingga pelaku dari kelompok mayoritas seperti kebal hukum. Keadaan itu jelas telah menyebabkan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

Safri (2015) membahas sakralnya agama yang bisa memunculkan intoleransi dan konflik ketika pemahaman agama juga dianggap sakral oleh pengikutnya, yang menghasilkan wilayah abu-abu atau ketidakjelasan antara agama dan pemikiran keagamaan. Dalam artikelnya ini, dia menjelaskan bagaimana agama bisa menjadi sosok yang menakutkan dan berbahaya, atau bahkan menjadi mengerikan karena menjadi dasar bencana kemanusiaan. Hal semacam ini terjadi karena sifat dan sikap eksklusivitas agama yang mengarah pada klaim kebenaran sepihak dan pada saat yang sama menuduh orang lain sebagai bid'ah, kafir dan harus diperangi. Penulis memberikan solusi untuk menghidupkan kembali budaya atau peradaban dialog agama, dan keterbukaan dalam menerima perbedaan, bahkan lebih dari sekadar keterbukaan, yang diharapkan dimiliki oleh setiap pemeluk agama sebuah ideologi pluralisme.

Fenton (2016) membicarakan intoleransi dan kefanatikan agama yang menjadi faktor utama dan berkontribusi dalam konflik sosial dan politik termasuk manifestasi dari kekerasan teroris di Indonesia. Sayangnya, kebebasan beragama yang tercantum dalam Konstitusi Indonesia, praktik sosial dan peraturan pemerintah tidak memenuhi jaminan hukum konstitusional dan internasional, yang memungkinkan terjadinya bias yang dilembagakan dalam perlakuan terhadap minoritas agama. Bias semacam itu menghambat transisi Indonesia ke demokrasi pluralistik yang berfungsi penuh dan mengorbankan cita-cita demokrasi kebebasan pribadi dan kebebasan berekspresi untuk tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam harmoni keagamaan dan sosial. Kasus Ahok justru menegaskan hal itu. Tulisan ini mengkaji landasan konstitusional kebebasan beragama, Undang-undang Penodaan Agama di Indonesia dan menjelaskan sejarah dan ajaran Pancasila yang mendikte kepercayaan akan Tuhan sebagai prinsip pertama ideologi negara. Tulisan ini berpendapat bahwa kegagalan negara Indonesia untuk mengakui keabsahan posisi teologis alternatif adalah hambatan utama bagi Indonesia untuk mengakui cita-cita tertinggi, yang diabadikan dalam moto nasional, bhineka tunggal ika.

Hasan (2017) menjelaskan militansi aktivis agama dan kekerasan terhadap minoritas pasca-Soeharto yang muncul akibat kegagalan negara dalam mengelola keragaman agama dan pluralitas masyarakat. Dasar dari persoalan ini berpangkal pada kontroversi UU No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama atau yang dikenal dengan UU Pencemaran Agama. Perdebatan yang panjang telah mengarah pada pelanggaran prinsip hukum mengenai jaminan kebebasan agama oleh konstitusi. Artikel ini juga membahas petisi yang diajukan oleh aktifis HAM dan ornop untuk mengajukan *judicial reviews* ke Mahkamah Konstitusi.

Marshall (2018) membahas ambiguitas kebebasan beragama di Indonesia. Pada satu sisi, konstitusi dengan jelas mencantumkan jaminan kebebasan beragama di Indonesia. Akan tetapi, pada sisi lain pelanggaran kelompok minoritas agama semakin marak terjadi. Intoleransi terus meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan, aliran kepercayaan pun belum mendapat tempat yang aman dalam konstitusi dan kebebasan menjalankan ibadahnya. Polisi dan perangkat hukum tidak bisa melakukan tindakan tegas karena seiring meningkatnya gerakan massa yang merasa diri sebagai mayoritas.

Romli (2018) membahas ekspresi politik identitas dan Islamisme yang menguat di banyak kanal media sosial. Berdasar data yang dimilikinya, penulis ini menunjukkan bahwa moderatisme NU dan Muhammadiyah digerogeti oleh intoleransi Islamisme. Tidak sedikit pengajar dan siswa serta mahasiswa (generasi Z) yang merasa dekat dengan NU dan Muhammadiyah ternyata bersimpati atau bahkan menyeberang ke haluan Islamisme.

Assyaukanie (2018) mengeksplorasi faktor penyebab yang lebih mendalam dari intoleransi dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia seiring meningkatnya data intoleransi yang dirilis oleh berbagai hasil survei oleh berbagai lembaga. Penulis ini membicarakan faktor penyebab itu melampaui penjelasan-penjelasan yang umumnya dikemukakan para penulis selama ini, seperti situasi politik, kondisi ekonomi, struktur sosial, dan karakter budaya. Menurut Assyaukanie, akar-intoleransi dan diskriminasi bisa ditelusuri ke

lanskap legal Indonesia berupa landasan negara, pasal-pasal konstitusional, undang-undang, dan aturan-aturan yang berlaku.

Al Qurtubi (2018: 43–54) menyoroti politisasi agama, khususnya politisasi Islam, yang kembali menyeruak ke ruang-ruang publik Indonesia. Rontoknya rezim Orde Baru menyebabkan bangkitnya kembali para petualang agama yang dulu sempat “dimumikan” oleh Suharto karena dianggap membahayakan stabilitas dirinya, keluarga Cendana, dan kroninya. Ketika Suharto tak lagi berkuasa, mereka pun bereuforia dan berpesta pora. Tak pelak, politisasi agama (Islam) yang cenderung berlebihan ini telah menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan berbangsa, beragama, dan bernegara di Tanah Air. Dia mengulas sejarah politik politisasi agama dan dampaknya dalam masyarakat serta prospek Indonesia di kemudian hari di tengah serbuan politik identitas yang kian menggema.

Sebenarnya, masih banyak lagi hasil penelitian dan pemikiran yang membahas semakin meningkatnya tindakan intoleransi di Indonesia dari berbagai sudut pandang seperti yang ditulis oleh Jeremy Menchik (2014), La Ode Ida (2015), Tim Lindsey and Helen Pausacker (ed.) (2016), Alexander R. Arifianto. (2016). George Cherian (2016), Ian Wilson (2017), Mohamed Nawab Osman & Prashant Waikar (2018). Inti dari semua tulisan mereka adalah mengulas semakin meningkatnya intoleransi di Indonesia. Bahkan, kegagalan Indonesia membendung laju tindakan intoleransi itu juga menghiiasi sejumlah pemberitaan di luar negeri sejak 2012, seperti di tulis dalam berita seperti “Indonesia Experiencing Increase in Religious Intolerance,” di *Voice of America News* / FIND, Washington D.C., Oct 23, 2012; “Tolerating intolerance; Islam in Indonesia”, di *The Economist*, London Vol. 403, Jun 9, 2012: 45; “Indonesia’s growing religious intolerance,” di *Open Democracy*, London Nov 26, 2014; “Religion as a political game: rising intolerance in Indonesia,” di *Open Democracy*, London Dec 01, 2014; “Should we worry about Islamism in Indonesia?,” di *The Conversation*, May 12, 2017; “Indonesia: Failure to Confront Intolerance,” di *Targeted News Service*, Washington, D.C. Jan 18, 2018.

Menghalau Tindakan Intoleransi di Indonesia

Situasi yang telah dipaparkan tersebut membuat banyak pihak berpikir kritis untuk berupaya mencegah dan mengatasinya melalui berbagai sudut pandang pemikiran. The Wahid Institute, misalnya, merekomendasikan agar pemerintah menguatkan koordinasi, meningkatkan deradikalisasi, dan melakukannya kerja sama dengan sipil. Ormas keagamaan moderat perlu bersinergi, menyebarkan narasi positif, dan menangani medium penyebaran radikalisme. Dunia usaha direkomendasikan untuk mempromosikan toleransi serta mencegah penggunaan platform media sosial.

Ada sejumlah tulisan yang menekankan pentingnya mengatasi intoleransi di Indonesia melalui jalur pendidikan. Julita Widya Dwintari (2017) mengusulkan pentingnya strategi pembelajaran PPKn untuk menanamkan nilai toleransi pada diri peserta didik. Afryansyah (2018) mengusulkan pentingnya pembelajaran sastra sebagai media untuk mencegah intoleransi dan deradikalisasi. Riyanto (2018) menekankan pentingnya peranan guru dalam menanamkan nilai toleransi beragama dan kemampuan guru dalam mengatasi persoalan upaya mengatasi sikap intoleransi beragama.

Nur Chanifah & Arif Mustafa (2016) menyatakan pentingnya memahami pertemuan antar agama untuk mencegah konflik, termasuk intoleransi agama. Pertemuan agama dapat ditemukan dalam nilai-nilai kemanusiaan atau aspek horisontal (*ḥabl min al-nās*), sedangkan aspek vertikal (*ḥabl min Allāh*) dalam kaitannya dengan Tuhan.

Selain itu, ada pula yang mengusulkan pentingnya merevitalisasi gerakan praktik nilai-nilai Pancasila dalam seluruh lini kehidupan berbangsa, seperti dikemukakan oleh Angel Damayanti (2017) serta Anggara Pratama Pratama, Gushidayat Afriandi, dan Indah Fajar Lestari (2017). Mereka berpendapat bahwa Pancasila memiliki ajaran nilai toleransi yang selama reformasi ini terlupakan.

Ada dua tulisan yang menunjukkan pentingnya mengajarkan toleransi melalui pendidikan

agama. Ellen Meyers (2018) menyarankan pentingnya reformasi pendidikan agama agar dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya mengatasi intoleransi karena sekolah adalah mikrokosmos negara bangsa. Dengan demikian, guru dapat menggunakan ruang kelas sebagai sarana memperkenalkan ajaran antaragama dengan tujuan membantu siswa menemukan landasan bersama di antara berbagai agama. Dengan begitu, anak-anak terbiasa menemukan cara untuk menggunakan cara bekerja sama antaragama guna menyelesaikan masalah bersama. Hasan Bastomi (2018) meminta masyarakat belajar toleransi seperti di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo. Di pondok pesantren itu, wawasan toleransi menjadi pendidikan dasar yang tidak hanya diajarkan dalam pengajaran formal di kelas saja, tetapi juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh santri. Pendidikan toleransi di Pondok Pesantren Gontor juga tercermin dalam muatan atau isi kurikulum yang mengajarkan wawasan santri akan keragaman keyakinan.

Berbeda dengan berbagai tulisan yang ada, tulisan ini membahas menanamkan nilai toleransi dan mentransmisikannya melalui tradisi. Hal itu terkait nilai kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Hal itu menjadi penting dilakukan karena berdasar hasil penelitian INFID (2016: 239), nilai budaya dan praktik sosial berperan dalam menghasilkan kecenderungan toleran/intoleran dan radikal. Nilai budaya dan praktik sosial berperan sebagai moderator dalam hubungan antara kepentingan ekonomi dan toleransi/intoleransi, serta hubungan antara perbedaan dan toleransi/intoleransi. Jika nilai budaya dan praktik sosial yang sejalan dengan toleransi kuat, maka intoleransi dan radikalisme juga dapat dihambat, dan sebaliknya.

Berdasar hal itu, tulisan ini bermaksud membicarakan hubungan persaudaraan antara pemeluk agama Islam (*Salang*) dan pemeluk agama Kristen (*Sarani*) di Alor dan cara merawatnya melalui tradisi, salah satunya ialah tradisi lisan *lego-lego*, berdasar hasil kerja etnografi di lapangan maupun berdasar rekaman catatan para akademisi terdahulu. Tujuannya untuk menunjukkan nilai persaudaraan berbasis tradisi yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain atau berbagai kelompok

etnis lain untuk tetap merawat keberagaman mereka demi kehidupan bersama yang harmonis.

TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA DI ALOR DALAM JEJAK TERDAHULU

“Belajarlah soal toleransi pada orang Alor khususnya, dan orang NTT, pada umumnya.” Begitu ujaran yang sering terlontar dari mulut orang-orang Alor melihat kenyataan di Indonesia seiring meningkatnya isu intoleransi. Nilai persaudaraan, termasuk persaudaraan dalam ranah agama, diajarkan oleh nenek moyang berbagai kelompok etnis di Alor melalui “semboyan” mereka. Setidaknya ada lima semboyan dari lima kelompok etnis di Alor yang meninggikan nilai persaudaraan, yaitu 1) 1) *taramiti tominuku* ‘berpegangan tangan untuk bersatu,’ (dalam bahasa Abui); 2) *mulenoa tenang eli* ‘merangkul untuk membangun’ (dalam bahasa daerah Pura); 3) *mapi tomnu* ‘mari bersatu hati’ (dalam bahasa Kabola); 4) *yemai tadi nokidi* ‘mari kita bersatu’ (dalam bahasa Kolana); 5) *dike date bote lefonarang* ‘baik buruk angkat nama kampung’ (dalam bahasa Alor).

Kehidupan beragama masyarakat di Kepulauan Alor-Pantar dan hubungannya dengan adat banyak mengundang minat para akademisi untuk membahasnya. Syarifuddin R. Gomang (2006) menulis “Muslim and Christian Alliances: ‘Familial Relationship’ between Inland and Coastal Peoples of the Belagar Community in Eastern Indonesia.” Artikel ini ditulis berdasar hasil penelitian ketika Indonesia dilanda konflik antarkelompok, baik antarkelompok etnis maupun antarkelompok agama, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Pada komunitas Belagar di Pantar, yang menjadi fokus tulisan ini, hubungan antara umat Kristiani di pedalaman dan muslim di pesisir tetap aman oleh ikatan persaudaraan (*ia mutu lol tela wala*). Ikatan itu, baik dalam bahasa Belagar maupun dalam bahasa Alor, diungkapkan dengan istilah *bela baja* ‘sumpah besar’, yang di Maluku dikenal sebagai *pela gandong*, dan di Kedang disebut *bela bayan*. Sebelum 1994, dipercaya bahwa stabilisasi politik dan hubungan harmonis antarkelompok dari agama dan kelompok etnis berbeda di Indonesia

Timur karena adanya hubungan persaudaraan seperti itu (*bela baja*, *pela gandong*, *bela bayan*, dan beberapa nama lain). Namun, sesudah 1994 situasi berubah dengan sangat cepat. Konflik terjadi di mana-mana. Namun, komunitas Belagar bisa terhindar dari konflik.

Tulisan Gomang (2006) ini ingin menunjukkan bahwa hubungan keluarga orang Belagar masih tetap terjaga meskipun institusi yang sama di Maluku diperlemah oleh kebijakan pemerintah, imigrasi, hilangnya tanah adat, dan berbagai faktor lain yang tidak relevan di Pantar.

Belagar berada di Pantar Timur, yang terdiri atas kaum Muslim dan Kristiani. Orang Belagar Muslim hidup di pesisir, sedangkan orang Belagar Kristiani hidup di pedalaman. Ikatan keluarga antara orang Belagar pesisir dan pedalaman tidak berdasar hubungan genealogis. Kedua kelompok itu mengaku bahwa mereka memiliki leluhur yang berbeda dan datang dari tempat yang berbeda. Setelah hidup berdekatan dan mengalami kesulitan bersama, mereka menggalang persaudaraan yang saling menguntungkan melalui ungkapan *ia mutu lol tela wala* ('persaudaraan antara kampung pedalaman dan pesisir'). Persaudaraan dibangun melalui ikatan *serang* antara individu dan ikatan *bela baja* antara klan, kampung, dan wilayah. *Serang* dalam bahasa Belagar berarti 'teman' atau 'partner.' Karena itu, ada hubungan keluarga antarklan di kampung pedalaman (Kristiani) dengan klan di kampung pesisir (Muslim). Hal itu berpengaruh terhadap penjelasan konsep pembangunan rumah adat, yang selalu memiliki dua ruang tidur.

Untuk menunjukkan keefektifan *serang* dan *bela baja* dalam mencegah konflik antarkelompok etnis dan agama, penulis artikel ini memberikan tiga kasus yang sangat memungkinkan terjadi perang saudara. Namun, semua itu dapat dicegah karena hubungan yang sudah terjalin oleh leluhur mereka melalui *serang* dan *bela baja*. Bahkan, karena hubungan itu pembangunan masjid dilakukan oleh orang Kristen dan gereja oleh orang Islam. Mereka pula yang menjaga setiap ada isu yang berusaha memecah belah hubungan keluarga.

Kelembagaan orang Belagar yang dikenal sebagai *ia mutu lol tela wala* itu juga terdapat di

Alor, yang dikenal sebagai *kakari wato watang* (persaudaraan antara orang pedalaman dan pesisir), yang dipahami sebagai aliansi antara kaum Kristiani dan Muslim. Contoh kampung persaudaraan Muslim dan Kristiani adalah Alor Besar (Islam) dan Adang (Kristen), Dulolong (Islam) dan Oa (Kristen). Istilah *eneng* atau *tniru* sama pengertiannya dengan *serang* di Belagar. Semua itu memperkuat solidaritas komunitas lokal yang mampu membuat orang Belagar terhindar dari konflik dahsyat yang melanda sebagian wilayah Indonesia Timur.

Emilie Wellfelt (2007) menulis "Diversity & Shared Identity: A Case Study of Interreligious Relations in Alor, Eastern Indonesia." Tulisan ini bertujuan menambah pemahaman tentang agama, etnisitas, dan konflik di Indonesia pasca-runtuhnya Orde Baru. Namun, tulisan ini memusatkan perhatian pada aspek solusi perdamaian dalam keberagaman agama yang ditemukan di wilayah Indonesia Timur, terutama di Kabupaten Alor. Melalui studi kasus di kampung Uma Pura, Pulau Ternate, dia meneliti identitas kelompok dan hubungan antarkelompok etnis dengan komunitas agama, baik komunitas yang seagama maupun yang tidak seagama. Kajiannya menggunakan metafor lokal. Masyarakat dimetaforkan sebagai tungku masak yang terdiri atas tiga batu: agama, pemerintah, dan adat. Batu tersebut merepresentasikan tiga arena otoritas: spiritual, religius, dan politis.

Uma Pura adalah kampung orang Muslim. Di samping itu ada empat permukiman lagi yang penduduknya semua beragama Protestan. Kedua kelompok beragama itu berbeda bahasa dan berbeda kelompok etnis. Namun, mereka dalam keseharian berinteraksi tanpa sekat. Bahkan, mereka saling merayakan hari raya Natal dan Idul Fitri. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana orang melalui proses pemikiran yang konstan menjunjung tinggi keberagaman agama dan kelompok etnis dan masih menemukan dasar untuk identitas bersama. Representasi tiga batu: agama, pemerintah, dan tradisi membantu menciptakan situasi harmonis di antara kedua kelompok beragama itu.

Pada 2010, Susanne Rodemeier menulis "Islam in The Protestant Environment of the

Alor and Pantar Islands.” Tulisan ini bertujuan menyajikan sudut pandang minoritas muslim dalam kehidupannya dengan komunitas Kristiani, yang menjadi kelompok mayoritas. Langkah awal yang ditempuh penulis ialah meneliti mitos bahwa orang di beberapa kampung menganggap kedatangan Islam pertama di Alor-Pantar membawa unsur ritual yang mengakibatkan perubahan sosial yang signifikan. Kemudian, penulis mendeskripsikan kebudayaan pantai yang diamatinya di wilayah muslim Alor-Pantar dan membandingkannya dengan kebudayaan pantai di Indonesia Barat, kemudian membandingkannya dengan kebudayaan pedalaman (pegunungan) di Alor-Pantar. Tujuannya ialah mempertanyakan peran perbedaan pantai-pedalaman pada tingkat lokal dalam hubungan antara komunitas Muslim dan Protestan. Karena Rodemeier membahas orang Muslim di Alor-Pantar, di dalam paparannya ada keterkaitan dengan Lerabaing ‘kampung raja’ orang Kui di Alor, misalnya tentang pisau khitan dari Raja Ternate, tongkat, dan berdirinya masjid tua di Lerabaing. Tulisan ini menyanggah pendapat bahwa ada kesepadanan antara penggunaan bahasa Austronesian dan Non-Austronesian dengan komunitas agama. Selama ini ada anggapan bahwa orang-orang Protestan menggunakan rumpun bahasa Non-Austronesian dan orang-orang Muslim menggunakan bahasa rumpun Austronesian. Ada fakta bahwa kelompok-kelompok Muslim di kampung-kampung Galiyao, seperti di Lerabaing (Alor Selatan) dan Bakalang (Pantar Timur) berbicara dengan menggunakan bahasa non-Austronesian.

Ada sejumlah konflik yang berkaitan dengan pertanahan, yang akhirnya di bawa ke perbedaan agama. Masalah juga muncul karena hukum perkawinan tradisional. Kedua masalah itu dapat diselesaikan melalui tradisi lokal. Namun, sekarang komunitas Muslim dan Kristiani menjadi lebih terpisah oleh permukiman begitu juga pilihan perkawinan yang dihubungkan dengan kepercayaan beragama. Perbedaan itu menjadi tampak mencolok karena penggunaan jilbab oleh perempuan muslim dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya sekadar pada saat menjalankan ibadah.

Nilai persaudaraan antarkelompok beragama di Alor itu juga pernah ditulis oleh Gomang (2013) yang membahas faktor yang mendukung terciptanya kerukunan beragama antara Islam dan Kristen di Desa Aimoli. Menurut Gomang, kerukunan antarumat beragama Kristen (*Sarani*) dan Islam (*Salang*) yang terjadi di Desa Aimoli karena ada ikatan solidaritas sosial yang kuat, yang menyatu dengan sistem nilai dan mengatur hubungan kekerabatan antaranggota masyarakat di Desa Aimoli. Ketiga faktor berbasis tradisi yang mampu mengikat mereka ialah *bela* (sumpah darah), *sota tifang sahi* (pepatah/sumpah adat) dan *lego-lego*. Ketiganya dianggap sebagai dasar ikatan pemersatu dalam nilai kemanusiaan.

Abednego B.P. (2015) juga memaparkan kerukunan antarumat beragama di Desa Pante Deere, Alor. Upaya dalam rangka menjaga kerukunan antara umat beragama di Desa Pante Deere melalui kegiatan olahraga dan kerja sama dalam mendirikan rumah ibadah. Pada setiap hari raya agama, seperti hari Natal, Paskah, Idul Fitri biasa diisi dengan kegiatan olahraga untuk memupuk solidaritas antarumat beragama. Kegiatan olahraga itu meliputi pertandingan sepak bola, bola voli, bulu tangkis, dan lari karung. Kegiatan keagamaan yang dilakukan pada setiap tahun untuk merayakan ataupun memeriahkan hari-hari raya keagamaan itu sangat bermanfaat bagi kaum muda-mudi karena melalui kegiatan itu mereka saling mengenal lebih dekat sehingga sangat bermanfaat terhadap kerukunan antarumat beragama.

Bukti lain hubungan baik antarumat beragama di Desa Pante Deere ialah adanya kerja sama dalam mendirikan rumah ibadah, seperti membangun gereja atau membangun musholla. Kegiatan pembangunan gereja diketuai oleh saudara-saudara yang beragama Islam. Sebaliknya, di dalam membangun musholla, ketua pembangunannya adalah saudara-saudara yang beragama Kristen.

Berbagai kajian terdahulu itu memberikan contoh bagaimana komunitas Muslim dan Kristiani menata kehidupan mereka bersama dengan menawarkan penghormatan khusus pada tradisi lokal. Orang-orang di tiap kampung mengembangkan cara menghindari konflik,

termasuk konflik yang bernuansa agama. Berbeda dengan berbagai tulisan di atas, tulisan ini membahas nilai persaudaraan antarumat beragama yang tampak dalam pelaksanaan dan lirik lagu (pantun) *lego-lego* dari berbagai kelompok etnis.

TRADISI LISAN *LEGO-LEGO* SEBAGAI WAHANA MERAWAT DAN MENTRANSMISIKAN NILAI TOLERANSI

Saling mengakui dan saling menghormati antarumat beragama di Alor-Pantar ditransmisikan dan dirawat salah satunya dengan menggunakan tradisi lisan *lego-lego*, baik melalui tata cara pelaksanaan maupun lirik lagunya. Tradisi lisan *Lego-lego* adalah lirik lagu tradisional yang dilantunkan bersamaan dengan tarian melingkar yang ditransmisikan dari generasi ke generasi. Tidak ada yang mengetahui siapa yang menciptakan lirik lagu tersebut sehingga *lego-lego* menjadi milik komunal dan dilakukan secara massal.

Pelaksanaan *Lego-lego* sebagai Representasi Penghargaan Antarkelompok

Untuk membahas toleransi antarumat beragama dan antarkelompok etnis dalam kehidupan orang Alor-Pantar, terutama melalui tradisi lisan *lego-lego*, pada tulisan ini dikemukakan tiga pelaksanaan *lego-lego* pada tiga kelompok etnis yang berbeda, yaitu di Takpala (orang Abui), di Lerabaing (orang Kui), dan di Moru (orang Hamap).

1. *Lego-lego* orang Abui di Kampung Takpala

Tiap tahun di Takpala diadakan upacara tradisional masuk kebun. Biasanya acara ini dilaksanakan pada bulan Juni-Juli. Acara ini dimaksudkan sebagai upaya memohon kepada Tuhan agar mereka diberi kemudahan dalam menanam berbagai bahan pangan dan menuai hasilnya dengan melimpah. Pada zaman dulu orang Abui harus membuka lahan terlebih dahulu dengan membabat hutan dan semak-semak, membersihkannya dan membakarnya, lalu baru dimulai menanam. Hal itu dilakukan karena

nenek moyang mereka tidak berkeburu secara menetap.

Upacara tradisional masuk kebun dilaksanakan sehari semalam. Pada siang hari diadakan berbagai ritual dalam tradisi orang Abui. Pada malam hari mereka menggelar *lego-lego* semalam suntuk, yang dimulai pada sekitar pukul 21.00 WITA hingga pukul 07 keesokan harinya. Sepanjang malam mereka menari melingkar diiringi nyanyian tradisional. Salah satu ciri khas *lego-lego* orang Abui ialah mereka tidak menggunakan alat musik apapun untuk mengiringi tarian melingkar mereka. Mereka hanya mengandalkan gemerincingnya bunyi gelang kaki yang dipakai kaum perempuan dalam lingkaran tarian dan hentakan kaki para peserta *lego-lego* dalam lingkaran.

Uniknya ialah pada pagi hari menjelang subuh *lego-lego* mereka berubah total. Alat musik tambur mulai digunakan. Hal itu dimaksudkan untuk menghargai saudara-saudara mereka yang berasal dari pantai, yang beragama Islam, yang sudah naik ke bukit untuk berpartisipasi dalam acara mereka semalaman. Orang Abui yang sebagian besar beragama Kristen menganggap bahwa saudara-saudara mereka yang beragama Islam sudah ikut menari dan menyanyi semalaman dengan mengikuti tata cara dalam *lego-lego* mereka. Oleh sebab itu, orang Abui juga harus menghormati tamu mereka dengan menggelar pertunjukan *lego-lego* yang memiliki ciri khas komunitas muslim, yaitu menggunakan tambur sebagai alat musik pengiring.

2. *Lego-lego* orang Kui pada Acara Peresmian Renovasi Masjid Tertua di Alor (2012)

Pada bulan Juli 2012 orang Kui memiliki hajatan besar, yaitu merenovasi masjid tua di Alor. Masjid itu memiliki sejarah khusus bagi orang Kui di Alor dan juga terkait sejarah masuknya agama Islam di Pulau Alor-Pantar, Nusa Tenggara Timur. Renovasi masjid yang dilakukan adalah mengganti atap masjid yang diperkirakan berdiri pada tahun 1600-an. Untuk melancarkan rencana pemugaran masjid bersejarah itu, orang Kui membentuk panitia pelaksana. Ketua panitia ialah Bapak Nasrudin Kinanggi, keturunan Bapak

Raja Katangkoli Kinanggi. Sementara itu, untuk memperlancar jalannya acara peresmian masjid yang dihadiri dan diresmikan oleh Bupati Alor, dibentuklah panitia lokal. Ternyata, panitia lokal pada acara itu bukanlah orang Kui, melainkan orang Abui, yang tinggal di dekat kampung Lerabaing. Orang Abui ini disebut orang gunung dan beragama Kristen. Pada saat peresmian hasil pemugaran masjid tua itu, panitia lokal yang beragama Kristen itu benar-benar menunjukkan ketulusan dalam membantu orang Kui yang beragama Islam. Segala sumber daya dikerahkan untuk kelancaran acara tersebut. Orang Abui itu berdatangan sebelum hari dilakukannya peresmian masjid dengan menyumbang kayu bakar, makanan, dan tentu saja tenaga yang tidak sedikit jumlahnya. Mereka menunggui kegiatan selama kurang lebih seminggu hingga acara benar-benar selesai.

Salah satu acara yang dilakukan pada saat peresmian hasil pemugaran masjid ialah menggelar *lego-lego* pada malam hari menjelang “pengatapan” masjid. Mereka mengundang wakil dari semua kelompok etnis yang ada di Alor Barat Daya, yaitu orang Abui, Klon, dan Hamap, yang kesemuanya adalah non-muslim.

Ternyata dalam pelaksanaannya, lirik lagu dalam *lego-lego* yang dinyanyikan menggunakan lirik lagu dalam *lego-lego* orang Kui, Klon, Hamap, dan Abui. Bahkan, lirik *lego-lego* kelompok etnis banyak didendangkan. Artinya, mereka mencampurkan lima lirik *lego-lego* dalam bahasa yang berbeda karena memberi kesempatan kepada tamu dari kelompok etnis yang berbeda untuk mengangkat pantun mereka sendiri.

Berikut contoh lirik pembuka yang justru menggunakan bahasa Alor.

*O hela hela e
elo e pana
elo o
elo elo e
hela e sama e
elo e
soru soru e
soro e sai o
nae e soro soro e
soro e sama su*

Setelah itu, *lego-lego* dilanjutkan dalam bahasa Kui. Di tengah-tengah lirik lagu dalam bahasa Kui, tiba-tiba ada yang “angkat lagu” dalam bahasa Abui. Berikut ini adalah contohnya.

*Akil na awai na o aban tala ia
Akil na awai na o aban tala ia
into nawe aban tala ia
Akil na awai e aban tala ia*

“*Lego-lego* campuran” itu hanya berlangsung beberapa putaran. Namun, meskipun digelar hanya dalam beberapa putaran, hal itu sarat dengan makna simbolik, yakni menjalin persaudaraan tanpa dibatasi oleh batas kelompok etnis, bahasa, dan juga agama. Mereka bergandeng tangan untuk saling berbagi dan saling mendukung. Setelah itu, orang Kui menggelar *lego-lego* sendiri dan orang Abui menggelar *lego-lego* sendiri secara berdampingan.

3. *Lego-lego* orang Hamap di Moru (2013)

Pada pertengahan tahun 2013 saya berkesempatan untuk mengikuti pertunjukan *lego-lego* di Moru, Alor Barat Daya. Pada waktu itu *lego-lego* digelar sebagai bagian dari acara dimulainya pembuatan pagar tembok sebuah masjid yang dibangun oleh orang Kui, yang beragama Islam. Saya berpikir bahwa pastilah yang berpartisipasi dalam *lego-lego* itu adalah orang-orang Kui sebagai pemeluk agama Islam karena *lego-lego* yang digelar berkaitan dengan pembangunan masjid. Ternyata dugaan saya salah. *Lego-lego* yang digelar adalah *lego-lego* orang Hamap, yang beragama Kristen. Tentu saja bahasa yang digunakan untuk menggelar *lego-lego* juga bahasa Hamap dan dengan tata cara *lego-lego* orang Hamap. Peserta dalam *lego-lego* itu bercampur antara orang Hamap dan orang Kui. Mereka semalaman menari dan menyanyi dalam lingkaran yang sama.

Orang Kui yang sebagian berjilbab itu tidak merasa keberatan berkaitan dengan penggelaran *lego-lego* orang Hamap yang beragama Kristen

di depan masjid yang akan dibangun pagarnya. Mereka menganggap bahwa kesadaran akan adanya perbedaan di antara mereka memang perlu. Akan tetapi, perbedaan itu lantas tidak dapat digunakan sebagai upaya memisahkan mereka karena pada kenyataannya mereka hidup berdampingan dalam wilayah yang sama.

Pelaksanaan *lego-lego* di Alor secara tidak langsung mengajarkan kepada orang Alor untuk saling bergandeng tangan meskipun mereka memiliki perbedaan, baik etnisitas maupun agama. Hal itu ditunjukkan dalam simbolisasi saling berpegangan atau berangkulan membentuk lingkaran *lego-lego* dalam menyanyi dan menari bersama. Cara lain yang mereka gunakan untuk menunjukkan saling menghargai perbedaan ialah “memberi panggung” kepada tradisi *lego-lego* komunitas muslim dalam pelaksanaan *lego-lego* yang digelar oleh kelompok etnis yang mayoritas adalah umat Kristiani dan juga memberi kesempatan kepada berbagai kelompok etnis untuk “mengangkat pantun” dalam gelaran bersama.

Lirik *Lego-lego* sebagai wahana dan merawat nilai persaudaraan

Dalam berbagai lirik lagu *lego-lego* terkandung unsur untuk merawat dan mentransmisikan nilai persaudaraan antarkelompok beragama. Dalam *lego-lego* orang Kui, ada lirik yang secara khusus berkaitan dengan isu toleransi itu.

Dolla lalawe taregsel nuku e
gunung pantai pantai satu hati satu e
orang gunung dan orang pantai satu hati

pai-pai duwe e nuku taitabela nanga
kita kita semua e satu jangan saling menyalahkan
tidak
kita-kita semua adalah satu sehingga tidak boleh
saling menyalahkan

Dolla pada lirik di atas mengacu pada orang gunung, yang dianggap sebagai umat Kristiani. Sementara itu, *lalawe* mengacu pada orang pantai, yang dianggap sebagai umat Muslim. Leluhur orang Kui mengajarkan bahwa orang Kui sebagai orang Muslim harus bertoleransi dengan para pemeluk agama lain, yang tinggal di gunung. Mereka berprinsip bahwa gunung dan

pantai saling melengkapi. Bahkan, dalam pasar adat mereka berprinsip bahwa “orang gunung dan orang pantai bertemu di pinggir laut.” Karena itu, leluhur orang Kui mengajarkan bahwa jika terjadi masalah antara orang gunung (Kristen) dan orang pantai (Kui, muslim), jangan saling menyalahkan. Lebih baik, dimusyawarahkan untuk mencapai kesepakatan bersama. Ajaran toleransi antarumat beragama dalam lirik lagu *lego-lego*, terutama antara umat Muslim dan Kristiani, memang benar-benar diterapkan oleh kedua kelompok tersebut.

Sementara itu, dalam lirik lagu *lego-lego* orang Hamap, ada lima pasang lirik lagu yang berkaitan dengan nilai toleransi.

bap sutafen tofangsa
nenek melahirkan begitu banyak anak

den Lifang lol den Adang lol
Sebagian berjalan ke pantai, sebagian berjalan ke gunung

Lirik itu menceritakan bahwa orang Islam yang disebut sebagai orang pantai dan orang Kristen yang disebut orang gunung itu berasal dari nenek moyang yang sama. Hanya saja, sebagian di antara mereka ada yang memilih masuk Islam dan sebagian lagi memilih masuk Kristen. Namun, mereka tetap bersaudara karena berasal dari satu nenek moyang yang sama atau seketurunan.

Humno 'no na arabusi fasi
menyatukan kekeluargaan antara dua: air pinang manis, air kelapa manis

pinang alo nuelang
Kita berdua hanyalah satu ikatan

Lirik tersebut menceritakan bahwa pinang dan kelapa itu sebagai simbol dari dua kelompok yang berbeda, yaitu orang gunung (pinang) dan orang pantai (kelapa). Namun, keduanya harus tetap dipersatukan karena saling memerlukan dan keduanya sama-sama manisnya. Jika pun memilih makan pinang, orang akan merasakan manisnya. Jika pun memilih minum air kelapa, juga ada rasa manisnya. Artinya, memilih beragama Islam atau Kristen itu soal pilihan. Tetapi, dalam kehidupan, mereka saling membutuhkan sehingga harus tetap bersatu.

Atut lol abib mahil ade

Jika kamu ikut berjalan ke pantai, kamu makan daging kambing

nebuir lol bimahil ade

Jika kamu ikut berjalan ke gunung, kamu makan daging babi

Lirik tersebut menceritakan bahwa memang ada perbedaan antara umat Islam dan Kristen, yaitu makan daging babi atau makan daging kambing. Jika orang Alor memutuskan untuk memilih agama Islam, mereka tidak akan makan daging babi, tetapi makan daging kambing. Namun, dalam acara apa pun, mereka biasanya menyediakan keduanya, terutama jika yang mempunyai acara adalah kelompok orang Kristen. Dapat dipastikan bahwa mereka menyediakan daging kambing dan ayam untuk saudara-saudaranya yang muslim.

Autur min nasalang aput

Jika kamu duluan meninggal, maka saya akan menguburkanmu dengan cara Islam

nanofemin sarani aput

Jika saya mati belakangan, kuburkan dengan cara Kristen

Lirik itu menceritakan tentang peristiwa kematian di antara dua anggota kelompok beragama yang berbeda. Sebagai saudara, jika orang Islam meninggal terlebih dahulu, orang Kristen akan menguburkannya dengan cara Islam. Begitu pun sebaliknya. Jika orang Kristen meninggal belakangan, orang Islam juga akan menghormatinya dengan cara menguburkan dengan menggunakan tata cara umat Kristen.

buku melang mo'eng bang lafeni

mereka berasal dari kampung di atas

dasing kota baru la iyo lele la timba hama hamala

mari kita menyumbang bersama-sama

Lirik *lego-lego* itu menceritakan bahwa orang Kristen yang berasal dari bukit (kampung di atas) dan orang Islam yang berada di pantai harus sama-sama menyumbang. Konteks lirik lagu ini ialah pada waktu dibangunnya masjid dan gereja di Moru yang berdekatan letaknya dan masa pembangunannya. Orang Islam maupun orang Kristen sama-sama menyumbang, baik pada saat pendirian masjid maupun pendirian gereja.

Selain itu, ada juga lirik lagu *lego-lego* dalam bahasa Abui yang berisi nilai persaudaraan antarumat beragama, yang dapat dikemukakan sebagai berikut.

Dene werle lolo

masyarakat yang hidup di pantai beragama Islam

dene tale lolo

masyarakat yang hidup di gunung beragama Kristen

Pi telet tomnu

Meskipun kita hidup berjauhan, kita harus selalu sehat

pi tara mihi tenut nu

Meskipun kita hidup berdekatan, kita tetap harus menjaga satu pemikiran agar tidak terjadi konflik

Maksud dari lirik lagu *lego-lego* itu ialah kelompok yang beragama Islam dan Kristen pada umumnya memang tinggal di permukiman yang berbeda: orang Muslim di pantai dan orang Kristen di gunung. Meskipun mereka saling terpisah tempat tinggal, mereka harus tetap sehat karena mereka saling membutuhkan berdasar keahlian.

PENUTUP

Tradisi lisan *lego-lego* bagi orang Alor, baik dalam pelaksanaan maupun dalam lirik lagunya, bertujuan mengingatkan orang Alor pentingnya untuk merawat nilai persaudaraan antara umat Kristen dan Islam karena mereka berasal dari satu nenek moyang. Hanya saja perjalanan yang ditempuh lah yang membedakan mereka memilih Islam atau Kristen. Karena itu, dapat dinyatakan bahwa *lego-lego* bagi orang Alor merupakan wadah memori kolektif tentang saling pengakuan antarkelompok, termasuk antarkelompok beragama. Tradisi lisan itu akan selalu mengingatkan nilai pentingnya toleransi karena selalu dilakukan pada berbagai acara, baik acara adat maupun acara formal yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Agar *lego-lego* yang sebagian liriknya mengajarkan toleransi tersebut tetap diminati oleh anak-anak muda, tradisi lisan *lego-lego* dibuat rekaman dengan menggunakan alat musik baru, dengan judul kaset rekaman "Taramiti Tominuku."

PUSTAKA ACUAN

- Afryansyah. (2018). "Pembelajaran Sastra sebagai Media Deradikalisasi: Sebuah Tinjauan Psikologi dan Sosiologi Sastra," dalam *Jurnal Logat*, Vol. 5 No. 2, Nov 2018: hlm. 168–181.
- Al Qurtubi, Sumanto. (2018). "Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia," dalam *Maarif* Vol. 13 No. 2 Desember 2018. Hlm. 43–54.
- Assyaukanie, Luthfie. (2018). "Akar-Akar Legal Intoleransi dan Diskriminasi di Indonesia," dalam *Maarif* Vol. 13 No. 2, Desember 2018: hlm. 27–43.
- Bastomi, Hasan. 2018. "Belajar Toleransi dari Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo," dalam *Edudeena*, Vol. 3 No. 1 2018: 57–71.
- BPS Kabupaten Alor. (<http://alorkab.go.id/new/index.php/kondisi-umum/keagamaan>, diunduh 10 Oktober 2017).
- Chanifah, Nur & Arif Mustafa. (2016). "Seeking Intersection of Religions: An Alternative Solution to Prevent the Problem of Religious Intolerance in Indonesia," in *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24 No. 2, November 2016, 413–422.
- Dwintari, Julita Widya. (2017). "Strategi Pembelajaran PPKn untuk Pengembangan Sikap Toleran Peserta Didik di Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK." Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III p-ISSN 2598-5973 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta e-ISSN 2599-008X.
- Damayanti, Angel (2017). "Pancasila Dalam Menjaga Keutuhan NKRI dari Aksi Intoleransi di Indonesia." Makalah dipaparkan dalam dalam Seminar "Pancasila dalam Menjaga Keutuhan NKRI" yang diselenggarakan di Kampus UKI, Jakarta, pada 21 Maret 2017.
- Fenton, Adam J. (2016). "Faith, Intolerance, Violence and Bigotry: Legal and Constitutional Issues of Freedom of Religion in Indonesia" dalam *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 10, No. 02, Hlm. 181–2015.
- Fitriani, Hani. (2017). "Penanaman Nilai-nilai Toleransi melalui Kajian Sejarah Lokal Kampung Adat Cigugur dalam Pembelajaran Sejarah." Tidak dipublikasikan. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- George, Cherian. (2016). *Hate Spin: The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy*. Massachusetts: The MIT Press.
- Gomang, Syarifuddin R. (2006). "Muslim and Christian Alliances: 'Familial Relationship' between Inland and Coastal Peoples of the Belagar Community in Eastern Indonesia," dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* (BKI), 162-4 (2006): 468—489.
- Gomang, Syarifuddin R. (1993). *The People of Alor and Their Alliances in Eastern Indonesia: A Study in Political Sociology*. Wollongong, Australia: University of Wollongong. [M.A.t hesis].
- Gomang, Alexander Piether Puling. (2013). *Sistem Kekerabatan Sosial Masyarakat Desa Aimoli – Alor dalam Relasi Islam dan Kristen*. Tesis Program Magister Sosiologi Agama, Program Pascasarjana FTEO-Universitas Kristen Satya Wacana.
- Hayamatsu, Kikue. (2013). The Limits of Civil Society in Democratic Indonesia: Media Freedom and Religious Intolerance, in *Journal of Contemporary Asia*, 43:4, 658–677.
- Ida, Laode. (2015). "Muslim Sects in Indonesia and the Emergence of Intolerance," *The Journal of Social, Political, and Economic Studies*; Washington Vol. 40, Iss 1/2, (Spring/Summer 2015): 3–26.
- Lindsey, Tim and Helen Pausacker (ed). 2016. *Religion, Law and Intolerance in Indonesia*. London/New York: Routledge.
- Marshall, Paul. (2018). "The Ambiguities of Religious Freedom in Indonesia," in *The Review of Faith & International Affairs*, 16:1, 85–96.
- Menchik, Jeremy. (2014). "Productive Intolerance: Godly Nationalism in Indonesia," in *Comparative Studies in Society and History* 2014;56(3):591–621.
- Myers, Ellen. (2018). "Unity in Diversity:" Education Reform in Indonesia. Paper unpublished. University of Michigan.
- Muhtadi, Burhanuddin. (2018). "Menguatnya intoleransi dan politik identitas" dalam *Media Indonesia*, 20 Desember 2018.
- Namira, Puspari. (2015). "The Increasing Intolerance towards Religious Minorities in Indonesia: Have the existing laws been protecting or marginalising them?" Master's Thesis
- LLM International and European Law Tilburg Law School, Tilburg University, Netherland. Unpublished.
- Noorhaidi, Hasan. "Religious Diversity and Blasphemy Law: Understanding Growing Religious Conflict and Intolerance in Post-Suharto Indonesia," dalam *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* Vol. 55, No. 1 (2017), pp.105–126.
- Mohamed Nawab Osman & Prashant Waikar (2018), (2018). "Fear and Loathing: Uncivil Islamism and Indonesia's Anti-Ahok Movement," in

- Indonesia*, Number 106, October 2018, pp. 89-109
- Penali, Abednego B.P. (2015). *Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Negeri Jember.
- Putra, Anggara Pratama; Gushidayat Afriandi, dan Indah Fajar Lestari. (2017). Gerakan GARSILA (Garda Pancasila) sebagai Upaya Penanggulangan Radikalisme di Indonesia Berbasis *Social Control*,” Makalah dalam Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, 1 November 2017, di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
- R. Arifianto, Alexander. (2016). *Addressing Religious Intolerance in Indonesia*. (RSIS Commentaries, No. 289). RSIS Commentaries. Singapore: Nanyang Technological University.
- Riyanto. (2018). “Peranan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Sikap Toleran Antarsiswa di SMP Negeri 1 Depok, Sleman,” dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*. Vol 7 No. 6, 2018: 604—6016.
- Rodemeier, Susanne. 2010. ”Islam in The Protestant Environment of The Alor and Pantar Island,” dalam *Indonesia and the Malay World* Vol. 38. No. 110 (2010), pp. 27—42.
- Romli, R. Cecep. (2018). “Beralih ke Haluan Islamisme: Gen Z, Media Sosial & Intoleransi di Indonesia,” dalam *Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan*, 22 (1), 2018: 31—43.
- Safri, Arif Nuh. (2015). “Tatkala Agama berubah menjadi bencana,” dalam *NIZHAM*, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015: hlm. 36—72.
- Takwin, Bagus; Amin Mudzakkir, Hairus Salim, Moh Iqbal Ahnaf, dan Ahmad Zainul Hamdi. 2016. “Studi tentang Toleransi dan Radikalisme di Indonesia.” Laporan Penelitian International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).
- Wellfelt, Emilie. (2007). ”Diversity & Shared Identity: A Case Study of Interreligious Relations in Alor, Eastern Indonesia.” Tesis Program Master.
- Wilson, Ian. (2017). “The Political Economy of Rising Religious Intolerance in Indonesia,” Paper A submission to the Department of Foreign Affairs and Trade *Foreign Policy White Paper 2017*, Asia Research Centre, Murdoch University
- <https://tirto.id/benarkah-intoleransi-antar-umat-be-ragama-meningkat-cEPz> Oleh: Scholastica Gerintya 15 Februari 2018
- <https://nasional.tempo.co/read/1118802/setara-institut-intoleransi-terhadap-keyakinan-meningkat>. Senin, 20 Agustus 2018
- <https://nasional.tempo.co/read/1136988/seban-yak-57-persen-guru-punya-opini-intoleran>. 16 Oktober 2018
- <https://www.voaindonesia.com/a/lipi-intoleransi-politik-di-indonesia-meningkat/4687374.html>. 05/12/2018
- <https://nasional.tempo.co/read/1153271/indeks-kota-toleran-singkawang-tertinggi-tanjung-balai-terendah/full&view=ok>. Jumat, 7 Desember 2018
- <https://mediaindonesia.com/read/detail/205379-menguatnya-intoleransi-dan-politik-identitas>. **Kamis 20 Desember 2018**

Pemberitaan Luar Negeri

- “Tolerating intolerance: Islam in Indonesia,” *The Economist*; London Vol. 403, Iss. 8788, (Jun 9, 2012): 45. <https://search.proquest.com/docview/1019705047?accountid=28818>.
- “Indonesia Experiencing Increase in Religious Intolerance; Lamb, Kate . *Voice of America News / FIND* ; Washington, (Oct 23, 2012); <https://search.proquest.com/docview/1114469120?accountid=28818>.
- “Indonesia’s growing religious intolerance,” Publication info: *OpenDemocracy* ; London [London]26 Nov 2014. <https://search.proquest.com/docview/1628060216?accountid=28818>
- “Religion as a political game: rising intolerance in Indonesia,” Publication info: *Open Democracy* ; London [London]01 Dec 2014 <https://search.proquest.com/docview/1628965666?accountid=28818>
- “Should we worry about Islamism in Indonesia?,” *The Conversation* | May 12, 2017 1.43pm AEST. Abdul Mughis Mudhoffir. <https://theconversation.com/should-we-worry-about-islamism-in-indonesia-77480>
- “Indonesia: Failure to Confront Intolerance.,” Publication info: *Targeted News Service*; Washington, D.C. [Washington, D.C]18 Jan 2018. <https://search.proquest.com/docview/1988974928?accountid=28818>

Sumber elektronik:

<https://news.detik.com/berita/d-3839963/survei-potensi-intoleransi-muslim-ri-meningkat-projihad-keras-13>. Senin 29 Januari 2018

STT
NO.1052/SK/DITJEN/PPG/STT/1986

ISSN 977-0125-9989-1-9



9 770125 998919

LIPI Press